

**PENDIDIKAN ISLAM DAN PENGUATAN NASIONALISME BANGSA
INDONESIA
(TELAAH ATAS PEMIKIRAN KH ABDURRAHMAN WAHID PADA
BUKU *ISLAMKU ISLAM ANDA ISLAM KITA* DAN *ISLAM
KOSMOPOLITAN*)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Ilmu Tarbiyah**



Disusun Oleh :

**MANSATA INDAH MARATONA
3103081**

**FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Mansata Indah Maratona

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Mansata Indah Maratona

NIM : 3103081

Judul : Pendidikan Islam dan Penguatan Nasionalisme Bangsa

Indonesia (Telaah Atas Pemikiran KH Abdurrahman Wahid Pada
Buku *Islamku Islam Anda Islam Kita* dan *Islam Kosmopolitan*).

Sudah selesai proses bimbingan sepenuhnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Juni 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Syamsul Maarif, M.Ag

Fatah Syukur NC, M.Ag



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

FAKULTAS TARBIYAH

Alamat : Jl. Raya Ngaliyan – Boja KM I Telp. (024) 7601295

PENGESAHAN PENGUJI

Tanggal

Tanda Tangan

Ahmad Muthohar, M.Ag

Agustus 2008

Ketua

Ahmad Magfurin, M.Ag

Agustus 2008

Sekretaris

Ismail SM, M.Ag

Agustus 2008

Anggota

Dr Hj Sukasih, M.Pd

Agustus 2008

Anggota

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang 30 Juli 2008

Deklarator

Mansata Indah Maratona

ABSTRAK

Mansata Indah Maratona (NIM: 3103081). Pendidikan Islam dan Penguatan Nasionalisme Bangsa Indonesia (Telaah Atas Pemikiran KH Abdurrahman Wahid Pada Buku *Islamku Islam Anda Islam Kita* dan *Islam Kosmopolitan*). Skripsi. Semarang. Program Strata 1 Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Walisongo 2008.

Permasalahannya adalah bagaimana konsep Abdurrahman Wahid mengenai penguatan nasionalisme bangsa Indonesia melalui pendidikan Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Gus Dur mengenai nasionalisme dalam Islam, peran pendidikan Islam dalam memperkuat jiwa nasionalisme Bangsa Indonesia dan relasi yang tepat antara nasionalisme dan agama.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode *library research*. Metode dokumenter sebagai satu-satunya metode yang digunakan, yaitu dengan mengumpulkan data-data berupa tulisan-tulisan yang mendukung penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam sangat mendukung nasionalisme bangsa. Ia bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi berjalannya pembangunan bangsa yang berideologi Pancasila, bukannya berperan sebagai ideologi tandingan yang bersifat disintegratif.

Konflik atas nama agama yang saat ini sering terjadi di Indonesia bukanlah karena ajaran Agama Islam. Hal itu lebih dikarenakan para pemeluknya yang memahami teks-teks keagamaannya secara setengah-setengah atau kurang komprehensif.

Dalam hal ini Pendidikan Agama Islam memiliki tugas berat untuk menyadarkan masyarakat. Ia diharapkan mampu menghindari hal-hal berikut: 1. Menumbuhkan semangat fanatisme buta. 2. Menumbuhkan sikap intoleran di kalangan peserta didik dan masyarakat Indonesia dan. 3. Memperlemah kerukunan hidup beragama serta persatuan dan kesatuan nasional.

Untuk itu, KH Abdurrahman Wahid memiliki konsep tentang penguatan nasionalisme Indonesia melalui pendidikan Agama Islam, yaitu: 1. Lebih menekankan Islam universal. 2. Berparadigma Islam substantif. 3. Islam sebagai komplementer dalam lingkup kebangsaan. 4. Pendidikan yang memperhatikan semua jenis, baik pendidikan formal, non formal dan informal. 5. Menggagas pribumisasi pendidikan Islam. 6. Melakukan pembaharuan dan modernisasi pendidikan Islam.

MOTTO

فا قم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله
ذلك الدين القيم و لكن اكثر الناس لا يعلمون. (الروم : 30)

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (QS. Ar-Rum: 30).¹

¹ R.H.A. Soenarjo, dkk., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 645.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan

Bagi seluruh saudara-saudariku,
putra-putri yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi.

Dan sebagai tanda cinta untuk:

Kedua Orang Tuaku; Bapak Imam Suyoto, Ibu Murwati,
Harapanku: Dek Ut, Dek Koi,
Mbah Yi, Mbah Kung

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya sehingga penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan semua orang yang mengikuti jejak langkahnya dalam menjalani kehidupan yang fana ini.

Dalam upaya menyelesaikan penelitian ini, saya telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Bantuan-bantuan tersebut tentunya sangat berarti dan membawa manfaat yang besar bagi penulis. Untuk itulah dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada mereka.

Terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor, Bapak Dekan dan stafnya yang telah berkenan membantu secara administratif atas proses penyelesaian skripsi ini. Khususnya kepada Ibu Vina, Ibu Faizah, dan Bapak Nasikun.
2. Bapak Syamsul Maarif, M.Ag dan Ibu. dan Bapak Fatah Syukur, M.Ag dan Ibu sebagai pembimbing dan guru abadi saya yang telah mengarahkan dan memberi spririt lahir batin demi selesainya skripsi ini secara maksimal. Mereka pulalah figur orang tua kedua saya.
3. Segenap kawan seperjuangan, adik, kakak dan teman sebaya di Kawah Candradimuka LPM Edukasi yang telah membangun pondasi berpikir dan bersikap saya. Suatu proses yang sangat penting menentukan bagi kehidupan saya ke depan. Tetap semangat para pejuang!
4. Bapak-Ibu dosen yang telah dengan ikhlas mendampingi penulis sebagai teman diskusi. *Wabil khusus* Bapak Syamsul Maarif, Bapak Fatah Syukur, Bapak Ismail SM, Bapak Rikza Chamami, Bapak Zainul Adzfar Ushuluddin, Bapak Abdul Kholik, Bapak Abdul Wahib, Bapak Achmadi, Bapak Hamdani Mu'in, Bu Vina.

5. Bapak dan Ibu tersayang serta seluruh keluarga yang telah mendorong dan membantu penulis serta memberikan doa restu dalam menimba ilmu pengetahuan.
6. Sahabat-sahabat istimewa, seluruh bidadari Ase Untari, Tina, Ulpek, Mba Siti, Hanik, Habib, Irna, Isti, Fami, Umroh, Una, Tina Kecil, Epi, Solekah, Maya, Farihah, Ani, Tutik, Kifa, Intan, Nujum, Farida, Ida, Mila dan para pengeran kerajaan mimpi: Bambang, Nasrul, Rozak, Hamam, Tawon, Suroso,
7. Anam dan Danu yang selalu menjadi ‘laskar jihad’ dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pejuang Tangguhku, dengan ucapan terimakasih telah menyediakan satu pundaknya untuk menggantung harapan-harapanku. Suatu kebanggaan bisa mendampingimu.
9. Sahabat-sahabat mahasiswa dan segenap pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini .

Semoga jasa-jasa beliau mendapat imbalan surga dan keridha'an dari Allah. Dan juga semoga dengan amal sholeh tersebut mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW

Kemudian penyusun mengakui kekurangan dan keterbatasan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, maka kritik, saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, dan juga masyarakat awam.

Semarang, 30 Juni 2008

Mansata Indah Maratona

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
DEKLARASI.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
 BAB II: KONSEP NASIONALISME DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	
A. Nasionalisme Indonesia	12
B. Agama Islam Memandang Nasionalisme Indonesia.....	20
C. Landasan Hukum Nasionalisme dan Penentangan Perpecahan Bangsa.....	23
D. Kerukunan Umat Beragama Sebagai Satu Bentuk Nasionalisme.....	24
E. Arti Penting Pendidikan Agama Islam dan Penguatan Nasionalisme Indonesia.....	29

BAB III:	KONSEP ABDURRAHMAN WAHID TENTANG NASIONALISME DAN PERAN PENTING PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	
	A. Biografi KH. Abdurrahman Wahid	36
	B. Corak Pemikiran Gus Dur.....	39
	C. Peran Penting dalam Konteks Kebangsaan dan Keagamaan.....	42
	D. Pendapat Gus Dur Tentang Nasionalisme Indonesia	44
	E. Pendapat Gus Dur Tentang Relasi Agama dan Penguatan Nasionalisme.....	48
	F. Arti Penting Pendidikan Agama Islam dalam Penguatan Nasionalisme Menurut Gus Dur.....	52
BAB IV:	KONSEP PENGUATAN NASIONALISME MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MENURUT PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID	
	A. Agama Menjadi Motivator dan Inspirator Bangsa Indonesia.....	57
	B. Hambatan yang Dihadapi dalam Penguatan Nasionalisme Indonesia Melalui Pendidikan Agama Islam	65
	C. Konsep Pemikiran Nasionalisme Gus Dur dalam Pendidikan Agama Islam	69
BAB V:	PENUTUP	
	A. Simpulan	74
	B. Saran-Saran	76
	C. Penutup	78

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam menurut Gus Dur sangat mendukung nasionalisme. Ia menyatakan bahwa ada hubungan antara Islam dan nasionalisme dalam kaitan hidup bernegara. Dimana agama (Islam) mampu memberi kontribusi positif dalam nasionalisme Indonesia.¹

Berbagai pihak yang terang-terangan ingin memisahkan diri dari kesatuan Indonesia atau mendirikan negara berbasis agama ditanggapi cucu Hasyim Asyari ini dengan penolakan. Ia mengatakan bahwa tidak ada konsep negara dalam Islam. Ia menilai gagasan mengenai negara Islam tidaklah konseptual, dan tidak diikuti oleh mayoritas muslim. Akan tetapi hanya dipandang sebagian kecil orang yang memandang Islam dari sudut institusionalnya saja.²

Merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim untuk mempertahankan kedaulatan negara dan berusaha untuk membangunnya. Nabi Muhammad saw juga telah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَيَصْبِرْ
فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الصُّلْطَانِ شَبْرًا مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً³ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi saw beliau bersabda: "Siapa yang melihat suatu tindakan pembesarnya yang tidak menyenangkan,

¹ Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 110

Di lain pihak ada penelitian yang dilakukan Aris Subiyono dan Tatang Muttaqin pada tahun 2004 yang menunjukkan bahwa nasionalisme atau ikatan kebangsaan Indonesia menipis yang disebabkan oleh ideologi, sejarah dan agama.

² Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 84

³ Bukhori, *Matan Masykul Al Bukhori*, (Kairo: Darulfikr, tt), Juz IV hlm. 222

Adapun para ahli hadits belum menemukan asbabul wurud dari hadits ini, sehingga dalam kitab asbabul wurud, hadits ini tidak dituliskan, Imam Bukhori juga tidak memberikan penjelasan dalam sarah hadits tersebut.

hendaklah bersabar karena siapa yang keluar dari kekuasaan yang sah barang sejenkal, niscaya orang itu mati secara kematian jahiliyah.”⁴

Hal ini menunjukkan bahwasanya Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah juga mensyariatkan umatnya untuk memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan tidak diperkenankan untuk mengambil tindakan memisahkan diri dari kepemimpinan negara yang syah.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa menipisnya ikatan kebangsaan karena agama memang terjadi, hal ini dindikasikan oleh munculnya gerakan-gerakan separatis di Indonesia. Akan tetapi hal itu bukan karena ajaran agama (khususnya Islam) yang tidak mendukung nasionalisme akan tetapi karena para pemeluk agama mengalami pendangkalan pemahaman teks-teks keagamaan. Disinilah arti penting pendidikan Islam. Yaitu sebagai media transfer pemahaman keIslaman yang inklusif dan kontekstual. Karena sampai sekarang pendidikan dipercaya sebagai sarana paling ampuh untuk proses transformasi nilai, termasuk nilai-nilai nasionalisme dalam Agama Islam.

Cak Nur mengatakan, bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengatasi perpecahan bangsa dan membangun sumberdaya manusia (SDM).⁵ Pada tulisannya yang lain dia juga menyatakan bahwa Pendidikan itu juga dimulai oleh Belanda pada permulaan abad ini. Apapun motifnya dan bagaimanapun efek sampingnya yang negatif, tetapi kenyataan bahwa sikap mental yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah Belanda itulah yang memberikan kemungkinan diketemukannya kesamaan dalam *frame of reference* dua orang dari dua daerah yang berbeda sehingga dapat dikatakan bahwa “orang Indonesia” ialah orang yang berpendidikan, sedangkan yang tidak berpendidikan hanyalah menjadi daerahnya atau sukunya sendiri.⁶

⁴ Bukhori, *Terjemah Hadits Shahih Bukhori* jilid 4, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1992), cet. ke-13, hlm 125.

⁵ Nurcholis Madjid, “Madrasah yang Terus Tersendat”, *Kompas*, Jakarta, 10 Oktober 2001, hlm. 8

⁶ Nurcholis Madjid, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 132.

Pendidikan merupakan kunci pokok dalam pembentukan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia. Oleh karena itu diharapkan melalui pendidikan akan mampu melahirkan generasi yang memiliki kepribadian kuat dan jiwa nasionalisme yang tinggi, dengan begitu akan mampu menciptakan bangsa yang besar dan memiliki keadilan. Lebih spesifik lagi pendidikan Islam dalam konteks kebangsaan sangat diharapkan mampu memberikan pemahaman Islam yang inklusif, komprehensif dan kontekstual. Namun jika pendidikan Islam mengalami kegagalan maka yang terjadi justru sebaliknya. Bangsa Indonesia akan terpecah menjadi serpihan-serpihan kecil dengan batas perbedaan suku, ras, agama atau bahkan hirarki ekonomi. Sehingga tujuan dan cita-cita luhur bangsa yang terangkum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya akan menjadi mimpi masa lalu yang tak pantas diceritakan.

Uraian di atas merupakan dasar permasalahan dari skripsi yang akan penulis buat. Yaitu adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Karena idealnya nasionalisme dan Agama Islam memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling mendukung. Sedangkan kenyataannya, sebagaimana penelitian Tatang Muttaqin tersebut justru agama merupakan salah satu alasan seseorang atau sekelompok orang untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis memilih menganalisis pandangan Gus Dur. Hal ini menurut penulis sangat representatif. Sebagai seorang kyai dan sekaligus tokoh politik yang sempat menjadi presiden Indonesia, KH Abdurrahman Wahid tentu memiliki wacana keIslaman dan keindonesiaan yang kuat dan konseptual.

Ia memiliki pemikiran khas tentang konsep nasionalisme dalam Islam yang terlihat dalam banyak artikenya di berbagai media dan pidato-pidatonya. Antara lain ia berpendapat antara Pancasila dan agama Islam sebenarnya bisa saling melengkapi. Sedangkan upaya-upaya mendirikan negara yang berdasar Islam merupakan bentuk politisasi Islam. Selain tidak sesuai dengan inti ajaran-ajaran Islam, politisasi Islam ini juga merupakan gagasan yang tidak

konseptual.⁷ Dalam frame pendidikan ia menilai bahwa pendidikan wawasan kebangsaan sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran nasionalisme bangsa bagi rakyat Indonesia.

B. Penegasan Istilah

1 Pendidikan Islam

Pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.⁸ Pendidikan Islam adalah pendidikan yang falsafah dasar dan tujuan serta teori-teori yang dibangun untuk melaksanakan praktek pendidikan didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al Quran dan Hadits.⁹

Dasar utama dari Pendidikan Islam adalah Al Quran dan Hadits, sebagai sumber ajaran agama Islam sendiri. Dalam konteks pendidikan, dapat dikatakan sebagai Pendidikan Islam, jika pendidikan yang diajarkan didasarkan pada kedua sumber hukum Islam tersebut, sehingga mendorong terciptanya kepribadian yang baik dalam parameter agama Islam. Jadi penelitian ini hanya akan membahas mengenai pendidikan Islam secara umum sehingga

2 Bangsa (Nation) dan Kebangsaan (Nasionalisme)

Nasionalisme berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *nation* “Bangsa atau nasion: ia adalah komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan.”¹⁰ Menurut JJ Rosseu sebagaimana yang dikutip dalam buku menuju Tata Indonesia Baru, Bangsa merupakan “asumsi dan konsep dasar mengenai

⁷ Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat*, Opc.it, hlm. 6.

⁸ Fuad Ikhsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), cet. I, hlm. 1.

⁹ Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Pustaka Pelajar, Cet. ke - 1, Yogyakarta, hlm. 99.

¹⁰ Benedict Anderson, *Imagined Communities Komunitas-Komunitas Terbayang*, (Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar, 2001), cet. ke-2, hlm.8.

Dalam penjelasannya dikatakan terbayang karena para anggota suatu bangsa tidak akan tahu sebagian besar yang lain akan tetapi dalam benak mereka hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka.

manusia individu yang bebas dan berkedudukan sederajat dengan sesamanya untuk membuat kesepakatan-kesepakatan, sebagaimana realitasnya tersimak dalam kehidupan masyarakat warga”¹¹

Nasionalisme atau kebangsaan adalah paham yang mengagungkan kesadaran dan kecintaan terhadap suatu ikatan imajiner yang terbangun dalam sebuah kelompok masyarakat tertentu. Dimana dalam komunitas tersebut memiliki sebuah sejarah, kesepakatan-kesepakatan dan cita-cita bersama. Oleh karena itu nasionalisme bersifat abstrak dan hanya dirasakan oleh kelompok tersebut sebagai bentuk ikatan kebersamaan.

3 KH Abdurrahman Wahid

Ia lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Ia pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Hasyim Asyari. Sebagai negarawan sekaligus agamawan ia memiliki pandangan yang luas dan integral mengenai konsep Islam dan negara yang bisa saling menguatkan.

“Abdurrahman Wahid tergolong pemikir yang liberal, moderat dan longgar.”¹² Nahdhatul Ulama adalah organisasi yang tidak bisa dipisahkan darinya. Oleh karena itu, pemikiran kyai ini banyak memengaruhi corak pandang organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

4 Buku *Islamku Islam Anda Islam Kita* dan *Islam Kosmopolitan*

Buku *Islamku Islam Anda Islam Kita* dan *Islam Kosmopolitan* adalah dua dari sekian banyak buku yang berisi bunga rampai dari tulisan-tulisan karya Abdurrahman Wahid. Buku-buku tersebut adalah yang terbanyak merangkum tulisan Gus Dur dan merupakan yang terbaru yang selama ini diterbitkan oleh The Wahid Institute. Buku tersebut berisi tentang wacana keislaman, politik, keindonesiaan dan sosial, serta masalah-masalah kontemporer lain.

¹¹ Selo Sumardjan (ed) *Menuju Tata Indonesia Baru*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 98.

¹² Syamsul Bakri dan Mudhofir, *Jombang Kairo Jombang Chicago Sintesa Pemikiran Gus Dur dan Cak Nur dalam Pembaruan Islam di Indonesia*, (Solo: Tiga Serangkai, 2004), hlm.29.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1 Bagaimana pandangan Gus Dur tentang nasionalisme negara?
- 2 Bagaimana Pendidikan Islam mampu mengajarkan generasi muslim untuk memiliki jiwa nasionalisme Indonesia yang tinggi?
- 3 Bagaimana hubungan nasionalisme dan Agama Islam menurut Gus Dur serta kontribusinya bagi pendidikan di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Gus Dur mengenai nasionalisme dalam Islam, peran pendidikan Islam dalam memperkuat jiwa nasionalisme Bangsa Indonesia dan relasi yang tepat antara nasionalisme dan agama.

2 Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini akan bermanfaat untuk mengetahui relasi yang terkait antara pendidikan Islam dan nasionalisme. Serta bagaimana menjawab permasalahan disintegrasi bangsa dari kaca mata pendidikan Islam.

Sedangkan secara praktis penelitian ini merupakan bentuk masukan bagi anak-anak Ibu Pertiwi guna peningkatan nasionalisme bangsa yang kian merosot. Selain itu sebagai bahan rujukan untuk pihak-pihak terkait dan masyarakat secara umum dalam memahami Islam yang nasionalis dan bukan teroris.

E. Kajian Pustaka

Penulis menyadari bahwa sudah banyak sekali kajian dan penelitian tentang tentang nasionalisme dan pendidikan Islam yang bersifat umum

maupun khusus, oleh karena itu penelitian ini hanya bersifat menambah pada penelitian yang telah ada.

- 1 Aris Subiyono dan Tatang Muttaqin dalam penelitian “Studi Pengembangan dan Pemantapan Wujud Ikatan Kebangsaan”. Mereka menyebutkan bahwa penyebab menurunnya ikatan kebangsaan tersebut adalah ideologi, sejarah dan agama. “Agama ternyata memberikan kontribusi yang nyata terhadap penguatan kebangsaan, karena sebagian besar responden menyikapi agama juga mengajarkan kecintaan terhadap bangsa dan negara.”¹³
- 2 Zudi Setiawan dalam buku “Nasionalisme NU”. Buku ini dahulunya adalah penelitian skripsi penulis pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip. Buku ini berisi tentang hubungan Islam dan negara dalam pandangan NU. NU sebagai salah satu organisasi yang tidak bisa dipisahkan dengan Gus Dur menilai nasionalisme atau kecintaan terhadap bangsa harus dijadikan sebagai modal dan semangat yang akan menyatukan daerah satu dengan yang lain.¹⁴
- 3 Skripsi saudara Asep Cuwantoro yang berjudul “Terorisme dan Pendidikan Pesantren”. Skripsi ini membahas tentang pesantren Ngruki yang di dalamnya berusaha mengupas tentang substansi dan materi yang diajarkan pada para santri sehingga membangun konstruk berfikir tertentu sesuai dengan tujuan. Pesantren ini banyak dikaitkan dengan sarang terorisme dan berkeinginan untuk mendirikan negara yang berdasarkan Agama Islam versi mereka.

Kalau selama ini penelitian yang telah disebutkan di atas lebih menyorot nasionalisme dalam segi sosial dan politik maka disini penulis lebih menekankan pada bidang pendidikan Agama Islam atau lebih condong pada pemahaman teks-teks Agama Islam. Sedangkan untuk skripsi saudara Asep Cuwantoro akan penulis gunakan sebagai analisis awal dalam memahami pola pikir pihak-pihak yang menginginkan pendirian negara berasas Islam.

¹³ Aris Subiyono dan Tatang Muttaqin, *op.cit.*

¹⁴ Zudi Setiawan, *Nasionalisme Nu*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2007), hlm. 124.

Dalam kaitan nasionalisme dan pendidikan Islam ini, penulis melihat bahwa Gus Dur tidak menjelaskan secara detail, oleh karena itu, penulis akan menganalisis pemikiran-pemikiran dia jika diterapkan dalam pendidikan Islam. Jadi bidang kajian yang penulis tawarkan berbeda dengan tulisan dan penelitian yang pernah penulis temui. Penelitian ini lebih spesifik sehingga hasil yang didapat akan lebih mendalam.

F. Metode Penelitian

1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan mengkaji pemikiran-pemikiran Gus Dur mengenai Islam dan nasionalisme dan kaitannya dengan pendidikan Islam serta kontribusinya dalam kehidupan berbangsa. Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas pendidikan Islam secara umum, tidak terperinci sebagaimana dalam sebuah kurikulum pendidikan atau sebagai mata pelajaran tertentu.

2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research*), yakni data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁵ Mengutip Bogdan dan Taylor, Lexy J. Moloeng mengatakan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁶ *Qualitative research* adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹⁷

Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif murni atau *literer*, maka pengumpulan data-datanya dilakukan melalui tehnik *library*

¹⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), cet. ke-3, hlm 29.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), cet. XVII, hlm. 3.

¹⁷ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 15.

research atau riset kepustakaan, yaitu dengan jalan mengumpulkan seluruh bahan-bahan penelitian yang dibutuhkan yang berasal dari dokumen-dokumen dan literatur-literatur.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi yang hendak mendudukan tinggi pada kemampuan manusia untuk berfikir reflektif, dan lebih jauh lagi menggunakan logika materiil dan probabilistik. Pendekatan ini juga mengangkat makna etika dalam bertoeeri dan berkonsep. Obyek ilmunya tidak terbatas pada yang empirik (sensual), melainkan mencakup phenomena yang tidak lain dari pada persepsi, pemikiran, kemauan dan keyakinan subyek tentang sesuatu diluar subyek, ada sesuatu yang transenden, disamping yang aposteriorik.¹⁸

3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode dokumenter. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berabagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.¹⁹ Data-data yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan sangat banyak tersedia dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, metode dokumenter akan menjadi metode utama dalam mengumpulkan data yang penulis butuhkan.

Metode ini akan penulis gunakan untuk mengumpulkan data berupa buku-buku atau tulisan di media massa seperti koran, majalah, jurnal dan internet yang ditulis oleh Abdurrahman Wahid sendiri dan orang lain yang terkait dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber primer berupa buku *Islamku Islam Anda Islam Kita* dan *Islam Kosmopolitan* yang berupa bunga rampai tulisan Abdurrahman Wahid. Di samping itu, juga didukung dengan sumber-sumber sekunder yang berasal dari tulisan-tulisan lain Gus Dur dan tulisan orang lain mengenai Gus Dur, serta tulisan-tulisan lain

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Op.Cit, hlm. 83.

¹⁹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), cet. ke-4, hlm.123.

yang mendukung pembahasan yang berkenaan dengan materi skripsi ini.

4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis data yang digunakan kurang jelas. Adapun pengertian analisis data sebagaimana yang disimpulkan Sugiyono adalah sebagai berikut:

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰

Proses pengolahan data ini dilakukan dari awal sampai akhir penelitian atau analisis sebelum di lapangan dan selama di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Adapun analisis akan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Analisis sebelum di lapangan

Analisis ini dilakukan terhadap data studi pendahuluan, atau data sekunder. Hal ini digunakan untuk menentukan fokus penelitian sementara.²¹ Analisis ini telah penulis gunakan pada tahap pembuatan proposal dan telah berhasil menemukan fokus penelitian sebagaimana sudah dijelaskan di awal, yaitu mengkaji pemikiran-pemikiran Gus Dur mengenai Islam dan nasionalisme dan kaitannya dengan pendidikan Islam serta kontribusinya dalam kehidupan berbangsa. Akan tetapi fokus yang penulis peroleh terdahulu tidak menutup kemungkinan akan bergeser atau berubah sama sekali sesuai dengan data-data yang selanjutnya ditemukan di lapangan.

b. Analisis selama pengumpulan data di lapangan

Selama mengumpulkan data, penulis juga melakukan analisis dari setiap data yang terkumpul. Jika ditemukan masalah atau kekurangan penulis akan segera melengkapinya sehingga semua data

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 89.

²¹ *Ibid*, hlm 90

yang diperlukan terkumpul. Penulis akan menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data tersebut adalah *data reduction* (merangkul data yang telah terkumpul dan memilih hal-hal yang pokok kemudian mencari tema dan polanya), *data display* (dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dsb), dan *conclusion drawing/verivication* (kesimpulan akhir).²²

²² *Ibid*, hlm 92-99.

BAB II

KONSEP NASIONALISME DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

A Nasionalisme Indonesia

1. Pengertian Nasionalisme

Nasionalisme berasal dari kata *nation* yang berarti bangsa. Adapun bangsa sebagaimana pendapat Badri Yatim memiliki dua pengertian, yaitu secara antropologis-sosiologis dan politis. Dalam pengertian pertama bangsa dimaknai sebagai suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan-hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan-hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah dan adat istiadat. Sedangkan dalam pengertian kedua, bangsa dimaknai sebagai suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam.¹

Selain itu, Badri Yatim juga mengutip pendapat beberapa tokoh mengenai nasionalisme.²

- a. Menurut Huszer dan Stevenson nasionalisme adalah yang menentukan bangsa mempunyai rasa cinta secara alami kepada tanah airnya.
- b. L. Stoddard nasionalisme adalah suatu keadaan jiwa dan suatu kepercayaan yang dianut oleh sejumlah besar manusia perseorangan sehingga mereka membentuk suatu kebangsaan. Atau dengan kata lain nasionalisme adalah rasa kebersamaan segolongan sebagai suatu bangsa.
- c. Hans Kohn menyatakan bahwa negara kebangsaan adalah cita-cita dan satu-satunya bentuk sah dari organisasi politik, dan bahwa bangsa adalah sumber dari semua tenaga kebudayaan kreatif dan kesejahteraan ekonomi.

¹ Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm 58.

² *Ibid*, hlm 58-60.

- d. Soekarno mendefinisikan nasionalisme sebagai kombinasi dari rasa ingin bersatu, persatuan perangai dan nasib, serta persatuan antara orang dan tempat.

Di lain pihak didefinisikan nasionalisme sebagai sebuah ideologi yang menyatakan suatu afinitas kelompok yang didasarkan atas bahasa, budaya, keturunan bersama; dan terkadang pada agama dan wilayah yang bersama pula; terhadap semua pengakuan lain atas loyalitas seseorang.

Nasionalisme atau kebangsaan dapat pula diartikan sebagai komunitas manusia yang memiliki nama/identitas bersama, memiliki keyakinan, komitmen dan sejarah bersama, memiliki budaya publik bersama, memiliki sistem perekonomian tunggal/bersama, memiliki hak dan kewajiban yang sama bagi anggotanya, dan menguasai tanah air bersama.³ Definisi lain menyatakan “*Nationalism recognized the crucial importance of education in the making of modern person – i.e. an individual skilled to function in industrial society.*”⁴

Sedangkan dalam buku lain dijelaskan bahwa nasionalisme adalah “paham ideologis yang mengajarkan kecintaan, kebanggaan dan kepercayaan besar terhadap negara dan bangsa sendiri demi mempertahankan dan mengekalkan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan dari bangsa dan negara yang bersangkutan.”⁵

Nasionalisme dalam Bahasa Arab diartikan sebagai *al suubiyah* atau menurut pendapat lain disebut juga *al wathoniah* menurut Frank Dhont yang dikutip Zudi setiawan didefinisikan sebagai paham dan proses di dalam sejarah ketika sekelompok orang merasa menjadi anggota dari suatu bangsa (*nation*) dan mereka secara bersama-sama

³ Tatang Muttaqin dan Aris Subiyono, “Studi Pengembangan dan Pemantapan Wujud Ikatan Kebangsaan”, http://www.budpar.go.id/filedata/1004_168-Kajian20041.pdf. Diambil pada 15 September 2007.

⁴ John A. Hall (*ed.*), *The State of The Nation*, (New York: Cambridge University, 1998), hlm 28.

⁵ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1997), hlm. 704.

ingin mendirikan sebuah negara (*state*) yang mencakup semua anggota kelompok tersebut.⁶

Antony Smith membagi pandangan nasionalisme dalam dua aliran besar, yaitu instrumentalis modernis dan perennialis primordialis.⁷ Aliran pertama, instrumentalis modernis menganggap nation dan nasionalisme sebagai instrumen yang dipergunakan elite politik untuk meraih tujuannya. Nation dan nasionalisme dianggap sebagai produk dari suatu syarat-syarat modernisasi seperti halnya negara modern, birokrasi, sekularisasi dan kapitalisme.

Sedangkan aliran kedua, perennialis primordialis menganggap bangsa sebagai suatu yang bersifat primordial atau sebuah kodrat yang telah digariskan. Nation dianggap sebagai kenyataan sejarah yang kadang tidak diingat. Adapun negara, birokrasi dan partai politik dipandang sebagai pembagian etnik dan identitas kultural yang sebelumnya telah ada.

Dalam hal ini ada perbedaan definisi antara bangsa dan negara. Mereka merupakan dua kata yang memiliki konteks berbeda dan memiliki pemahaman yang tidak sama. Bangsa adalah masyarakat etnis dan budaya yang merupakan sumber jatidiri masyarakat, sedangkan negara merupakan sebuah institusi politik atau sumber kekuasaan.

Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa nasionalisme adalah rasa cinta yang dimiliki oleh sekelompok besar orang yang berada pada suatu wilayah tertentu terhadap tanah airnya dan mereka memiliki cita-cita dan tujuan yang ingin diraih bersama sebagai suatu bangsa. Rasa kecintaan ini merupakan sebuah kesadaran yang ditandai dengan kesetiaan dan upaya memuliakan dan mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Karena rasa kecintaan inilah, maka nasionalisme sangat bernilai spiritual, artinya sesuatu yang sangat berhubungan dengan kejiwaan

⁶ Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2007) hlm. 25.

⁷ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kyai*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm 239.

seseorang dan bisa menjadi sumber nilai pada dirinya. Oleh karena itu nasionalisme pada diri seseorang akan mampu mendorongnya untuk mengorbankan harta, jiwa dan raganya untuk bangsa. Hal ini sebagaimana yang telah dibuktikan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Dengan semangat nasionalisme mereka rela mengorbankan segala yang dimilikinya tanpa pamrih untuk membebaskan tanah airnya dari belenggu penjajahan. Fenomena bom bunuh diri yang banyak terjadi di Palestina juga dinilai lebih didasari oleh semangat nasionalisme atas tanah kelahirannya yang diklaim dan dikuasai Israel.

2. Unsur-Unsur Pembentuk Nasionalisme

Menurut Ernest Renan yang sangat disepakati plokamator Indonesia, Soekarno hal yang paling utama dan mutlak diperlukan dalam pembentukan nasionalisme adalah kemauan dan tekad bersama.⁸ Kemauan dan tekad bersama ini pula lah yang kemudian melahirkan bangsa dan negara Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Renan juga mengemukakan beberapa faktor penting bagi terbentuknya jiwa atau semangat kecintaan terhadap suatu bangsa.⁹

- a. Kejayaan dan kemuliaan di masa lampau.
- b. Suatu keinginan hidup bersama baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang.
- c. Penderitaan bersama atau rasa senasib sepenanggungan sehingga menimbulkan solidaritas besar untuk bangkit.
- d. Penderitaan besar yang dialami bersama dalam sejarah melahirkan pula apa yang disebut modal sosial.

Sunardi dan Ryamizard Ryacudu memberi tambahan dengan mengkonsepsikan paham kebangsaan atau yang lebih suka ia sebut wawasan kebangsaan dalam tiga komponen utama, yaitu rasa kebangsaan, paham (pemahaman) kebangsaan, dan semangat

⁸ Zudi Setiawan, *op.cit*, hlm. 26.

⁹ Abdul Hadi WM, "Pancasila, Nasionalisme, Islam, dan Kolonialisme", <http://ahmadsamantho.wordpress.com/2007/11/12/195/>, diambil pada 5 Januari 2008.

kebangsaan. Tiga hal itulah yang menyebabkan nasionalisme sering dipandang sebagai ideologi pemelihara negara-bangsa.

Dengan begitu, ada lima unsur yang membentuk nasionalisme, yaitu keinginan bersatu, perasaan cinta, pemahaman atau orientasi kebangsaan dan adanya semangat. Nasionalisme yang menurun di Indonesia dan negara berkembang lainnya dikarenakan orientasi kebangsaan yang belum jelas ini.

Nasionalisme merupakan pilar penyangga bangsa, karena tanpa itu, bangsa dan negara tidak akan bisa bertahan. Sejak awal nasionalisme telah menjadi kunci pokok perjalanan kebangsaan Indonesia. Nasionalisme sebelum kemerdekaan digunakan sebagai ideologi perjuangan untuk melawan penjajahan, adapun setelah kemerdekaan ia digunakan mempertahankan eksistensi dan membangun negara-bangsa.

Nasionalisme sangat bergantung pada identitas nasional atau jatidiri atau kepribadian bangsa. Robert de Ventos berteori bahwa identitas nasional merupakan hasil interaksi historis antara empat faktor penting. Empat faktor itu adalah pertama, faktor primer yang mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan yang sejenis. Kedua, faktor pendorong di dalamnya terdapat pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, dan sentralisasi monarkhi. Ketiga, faktor penarik, meliputi kodifikasi bahasa dalam gramatika resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pematapan sistem pendidikan sosial. Keempat, faktor reaktif yang meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat.¹⁰

Sedangkan Antony D. Smith memiliki tujuh kriteria yang membedakan bangsa dengan kelompok sosial lainnya.¹¹ Ketujuh hal tersebut adalah:

¹⁰ Asykuri Ibn Chamim et.al, *op.cit*, hlm. 211.

¹¹ Ali Maschan Moesa, *op.cit*, hlm.240.

- a. Kekhasan kultural.
- b. Kedekatan teritorial dan mobilitas di dalamnya.
- c. Relatif berskala besar dalam ukuran wilayah dan penduduk.
- d. Adanya relasi politik eksternal dengan kelompok lain, baik berbentuk konflik atau aliansi.
- e. Adanya sentimen dan loyalitas kelompok.
- f. Keanggotaan langsung dengan hak-hak kewarganegaraan yang sama.
- g. Adanya integrasi ekonomi vertikal di sekeliling sistem yang sama.

Dengan demikian, bangsa menurut Smith adalah etnik yang terintegrasi secara ekonomi dalam sistem kerja bersama dengan peran-peran yang saling menunjang dan yang anggota-anggotanya memiliki hak yang sama sebagai warga negara dalam komunitas politik yang tidak diwakilkan.

Sebagai sebuah bangsa, Indonesia harus memiliki nasionalisme yang kuat. Karena hanya dengan nasionalisme itu pembangunan dan semua cita-cita bangsa Indonesia bisa dicapai, sebagaimana yang telah tersurat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya dengan nasionalisme itu, Indonesia bisa bersaing dengan negara-bangsa lain. Akan tetapi nasionalisme tidak ada dengan sendirinya. Ia dibentuk dan akan selalu berproses. Adapun salah satu faktor terpenting dalam menjaga nasionalisme adalah dengan adanya identitas nasional yang mantap.

3. Faktor yang Mempengaruhi Kuat Lemahnya Nasionalisme Bangsa

Lemahnya Nasionalisme bangsa terutama pada negara berkembang dinilai sebagai gejala umum. Fenomena dinilai Gus Dur sebagai fenomena yang sering terjadi di negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh ideologi negara yang belum mantap karena ditafsirkan secara kurang memusakan semua pihak sehingga memiliki potensi pertentangan lebih tajam di kemudian hari.¹²

¹² Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), hlm.183.

Banyak hal yang mempengaruhi kuat lemahnya kondisi nasionalisme Indonesia diantaranya adalah masalah penegakan hukum dan HAM, Otonomi Daerah, ketimpangan ekonomi konflik antar kelompok, gerakan separatis, demokrasi, *civil society*, pluralisme, semakin menguatnya rasa etnisitas kedaerahan, dan implikasi dari dialektika religio-etnisitas.¹³

Berdasarkan pendapat lain, hal-hal yang membuat nasionalisme bangsa menurun sehingga harus dicegah adalah sebagai berikut:

- a. Pikiran dan perasaan antar suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat dan golongan masyarakat yang merasa lebih superior dari yang lain. Perasaan ini bersumber dari rasa fanatisme kelompok atau golongan yang sempit.
- b. Kesenjangan pembangunan wilayah. Secara umum pembangunan antar wilayah ini terbagi menjadi dua, yaitu Indonesia kawasan barat dan Indonesia kawasan timur.
- c. Kesenjangan sosial dan ekonomi antar golongan penduduk.
- d. Segala upaya pengekan proses demokratisasi dan desentralisasi dengan alasan stabilitas dan kesatuan bangsa yang berlebihan.¹⁴

Empat hal ini akan mengakibatkan kecemburuan sosial antar kelompok dan perasaan kedaerahan yang berlebihan (*chauvinisme*). Kecemburuan sosial ini pada suatu saat akan menjadi alasan yang kuat untuk menimbulkan konflik antar masyarakat.

Selain itu, globalisasi yang ada juga disinyalir menyebabkan runtuhnya nasionalisme. Banyak masyarakat terutama bangsa modern yang tidak lagi mempedulikan garis-garis batas antar negara dan lebih cenderung berfikir dalam konteks kontinental. Dalam jangka jauh, globalisasi akan memporakporandakan adat budaya yang merupakan jati diri suatu bangsa.

¹³ Ali Maschan Moesa, *op.cit*, hlm. 247.

¹⁴ Soerjanto Poespowardojo (*ed*), *Pendidikan Wawasan kebangsaan*, (Grasindo: Jakarta, 1994), hlm.43-44.

”Suatu masyarakat dan bangsa akan kehilangan wawasannya sebagai suatu bangsa yang memiliki suatu wilayah kehidupan apabila bangsa itu kehilangan identitasnya.”¹⁵ Dalam konsep wawasan nusantara terdapat tiga kepentingan nasional yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan nasional, identitas (jatidiri bangsa) dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.¹⁶

Pendapat lain mengatakan bahwa penyebab konflik yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa adalah kebijakan militer dan kesenjangan pembangunan dan persoalan yang bermula pada persoalan antar etnik dan agama.¹⁷

Sedangkan pada sebuah penelitian menyebutkan bahwa ”secara sendiri-sendiri masing-masing faktor baik yang bersifat emosional (sejarah, ideologi, etnisitas, dan agama) maupun yang bersifat rasional instrumental (ekonomi, politik-birokrasi, hukum, militer) seluruhnya memiliki potensi hubungan yang signifikan dengan ikatan kebangsaan.”¹⁸

Lebih lanjut dijelaskan di antara 3 faktor yang berpengaruh terhadap penguatan ikatan kebangsaan, faktor ideologi menempati urutan pertama, sehingga dapat diartikan bahwa ideologi masyarakat sangat berpengaruhnya terhadap penguatan ikatan kebangsaan. Selanjutnya adalah faktor sejarah dan agama. Sebagian besar responden menyikapi agama juga mengajarkan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Mereka juga menyetujui kehidupan antar umat agama yang penuh toleransi sehingga mampu menguatkan ikatan kebangsaan di antara pemeluk agama yang berbeda-beda.¹⁹

¹⁵ H.A.R Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*, (Magelang: Tera Indonesia, 1999), cet 2, hlm.37

¹⁶ *Ibid*, hlm.72.

¹⁷ Zainuddin Maliki, *Agama Rakyat Agama Penguasa*, (Yogyakarta: Galang Press, 2000), hlm. 187

¹⁸ Tatang Muttaqin dan Aris Subiyono, *ibid*.

¹⁹ *Ibid*.

Dari uraian di atas sebenarnya banyak hal yang bisa memperlemah nasionalisme suatu bangsa dan bisa dibagi dalam dua bagian yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terbagi dalam dua bagian yaitu faktor emosional meliputi sejarah, ideologi, etnisitas dan agama. Sedangkan faktor instrumental meliputi kondisi ekonomi, politik, hukum dan militer. Adapun faktor eksternal seperti laju globalisasi.

Adapun salah satu indikator menurunnya nasionalisme suatu bangsa adalah usaha beberapa kelompok yang mengarah pada pemisahan diri dari kesatuan kebangsaan dengan berbagai alasan seperti keinginan untuk memiliki negara berideologi agama. Agama sering kali menjadi landasan dan alasan utama dalam perpecahan itu. Meski dinilai banyak pihak agama tidak menjadi isu murni namun hanya sebentar politisasi saja akan tetapi agama itu membuktikan agama memiliki potensi besar dalam kualitas nasionalisme Bangsa Indonesia.

Karena itu sangat penting menemukan konsep "nasionalisme baru" dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar sbb:²⁰

- a. Penghargaan terhadap prestasi atau meritokrasi.
- b. Alokasi ekonomi dan politik yang adil.
- c. Persamaan di depan hukum dan penegakan hukum (*law enforcement*) secara adil.
- d. Pengembangan sikap toleran terhadap berbagai perbedaan etnik, agama, golongan dan sebagainya dalam kerangka pengembangan nasionalisme multikultur.

B Agama Islam Memandang Nasionalisme Indonesia

Islam sebagai agama terakhir yang menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu tentunya memiliki kelebihan, yaitu mampu menjawab semua permasalahan umat dalam berbagai segi dan rentang waktu. Begitu juga dalam menghadapi permasalahan kebangsaan. Agama Islam sangat

²⁰ *Ibid..*

mendukung berbagai upaya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.

Islam pada awalnya memiliki citra dan cerita yang positif karena penyebarannya dengan jalan damai dan berperan dalam peningkatan peradaban manusia. "Bahkan secara politis Islam telah menjadi kekuatan dominan yang mampu menyangga dan mempersatukan penduduk nusantara yang bertebaran ini ke dalam sebuah identitas baru yang bernama Indonesia, sekalipun pada akhirnya secara legal formal ikatan keindonesiaan ini diatur dan diperkuat oleh administrasi dan ideologi negara."²¹

Dalam lingkup sejarah Indonesia agama Islam telah menunjukkan arti pentingnya dalam pembentukan kebangsaan Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa pondok pesantren dengan para kyainya menjadi basis paling kuat untuk melawan penjajah. Sebagaimana telah ditunjukkan dalam sebuah resolusi jihad yang dikeluarkan NU pada tanggal 22 Oktober 1945. Pesan jihadnya mampu mengobarkan semangat nasionalisme melawan penjajah seperti yang dimiliki oleh penyiar radio, Bung Tomo.

Sebelum membahas terlalu jauh, disini akan dipetakan beberapa gagasan tokoh muslim dari berbagai aliran pemikiran tentang kaitan antara agama dan negara. Dalam konteks keindonesiaan terdapat banyak paradigma yang menjelaskan konsep hubungan antara agama dan Negara-Bangsa Indonesia. Hal ini setidaknya bisa dipetakan dalam tiga golongan dengan paradigma masing-masing, yaitu golongan dengan paradigma integral, paradigma sekular dan paradigma simbiotik.

1. Paradigma Integral. Paradigma ini memiliki konsep tentang bersatunya agama dan negara. Dengan arti lain negara merupakan lembaga politik sekaligus lembaga keagamaan. Paham ini dianut oleh madzab Syiah dan banyak tokoh fundametalis. Kartosoewirjo, Amin Rais dan Hidayat Nur Wachid merupakan beberapa di antara tokoh Indonesia yang memiliki pemahaman sebagaimana paradigma ini.

²¹ Zainuddin Maliki, *op.cit*, hlm.xxv

Pemikiran politik para penganut aliran ini cenderung ke arah Islam formal yang menghendaki negara-agama (*teocratic state*). Negara Pancasila yang selama ini terbangun dinilai belum final dan harus disempurnakan dengan menggunakan Islam sebagai tandingan konsep *nation-state*.²² Dengan begitu cita-cita yang diinginkan adalah negara Indonesia dengan asas atau berundang-undang dasar Islam.

2. Paradigma Sekular atau idealis radikal. Paradigma ini menganggap bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang terpisah. Oleh karena itu, para penganut paham ini menolak Agama Islam dijadikan sebagai dasar negara. Paham ini diikuti oleh Soekarno.

Agama yang idealnya sangat membela hak-hak dan kebesaran Tuhan dan menekankan kewajiban manusia namun dianggap sangat sedikit menghargai keunggulan potensi manusia, menjadi alasan para penganut aliran ini. Menurut Komarudin Hidayat hal ini disebabkan trauma akan agama yang dinilai cenderung eksklusif, tidak ilmiah, dan mendorong orang menjadi fanatik terhadap kelompoknya, tidak toleran terhadap kelompok yang berbeda dan bahkan cenderung otoriter.²³ Oleh karena itu, agama dimasukkan dalam ruang privasi dan tidak dikehendaki ikut campur dalam konteks yang lebih luas seperti dalam lingkup politik kenegaraan.

3. Paradigma Simbiotik atau akomodatif. Paradigma terakhir ini memiliki konsep bahwa antara agama dan negara memiliki hubungan timbal balik yang saling membutuhkan dan saling mendukung. Cak Nur dan Gus Dur adalah di antara tokoh muslim Indonesia yang menganut pendapat ini.

Pemikiran politik aliran ini umumnya cenderung ke arah Islam substansial. Mereka menganggap dengan ideologisasi Islam berarti telah mereduksi Islam. Islam ditempatkan sebagai komplementer konsep *nation-state* dan Negara Pancasila dianggap telah final.²⁴

²² Ali Maschan Moesa, *op.cit*, hlm. 285

²³ Zainuddin Maliki, *op.cit*, hlm. xxii.

²⁴ Ali Maschan Moesa, *op.cit*, hlm. 290.

Relasi ketiga ini sebenarnya juga memiliki masalah. Yaitu ketika Agama Islam yang lebih mengedepankan universalitas sedangkan negara selalu berbicara mengenai batasan dan lokalitas tertentu. “Dalam merespon persoalan ini, para kiai berpendapat bahwa Islam seharusnya cukup diposisikan sebagai dasar moralitas dalam mengatur negara.”²⁵

Dari tiga tipe tersebut, Indonesia selama ini lebih menginginkan model terakhir, yaitu agama diharapkan mampu mensupport kehidupan kebangsaan. Hal ini melihat konteks Indonesia yang besar dan terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Keanekaragaman itu jika tidak diakomodir secara baik akan berpotensi menimbulkan masalah yang justru menghancurkan bangsa sendiri.

C Landasan Hukum Nasionalisme dan Penentangan Perpecahan Bangsa

Dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 213 disebutkan:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi Keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang Telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, Karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (Q.S. Al Baqarah.213)

²⁵ *Ibid*, hlm. 232.

Diceritakan pula ketika Rasulullah saw meninggalkan kota Makkah untuk berhijrah ke Madinah Nabi menengok ke kota Makkah beliau berucap: Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai, seandainya bukan yang bertempat tinggal di sini mengusirku, niscaya aku tidak akan meninggalkannya. Sahabat-sahabat Nabi Saw. pun demikian, sampai-sampai Nabi Saw. bermohon kepada Allah: Wahai Allah, cintakanlah kota Madinah kepada kami, sebagaimana engkau mencintakan kota Makkah kepada kami, bahkan lebih.

اللهم حبب إلينا المدينة مكة أو اشد اللهم بارك لنا في صاعينا و مدن و
صحيحها لنا ١ وانقل همها فجعل إلى الجحفة²⁶

Dalam sebuah hadits dari Ibnu Abbas r.a juga telah diceritakan bahwa dari Nabi saw telah bersabda: "Siapa yang melihat suatu tindakan pembesarnya yang tidak menyenangkan, hendaklah bersabar karena siapa yang keluar dari kekuasaan yang sah barang sejengkal, niscaya orang itu mati secara kematian jahiliyah."²⁷

Dari berbagai dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa cinta kepada tanah tumpah darah merupakan naluri manusia, dan paham kebangsaan atau nasionalisme sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Al Quran dan Sunnah. Islam sangat menghargai dimensi kemanusiaan itu sehingga sangat mendukungnya dengan menempatkannya sebagai bagian dari iman dan memberi pahala yang sangat besar bagi orang yang mempertahankan tanah kelahirannya itu.

D Kerukunan Umat Beragama Sebagai Satu Bentuk Nasionalisme

Nasionalisme Indonesia sebagaimana yang telah ditanamkan generasi terdahulu semakin pudar dan mulai digantikan oleh benturan antar kelompok atau golongan, baik yang berdasar kesukuan, ideologi, agama maupun kedaerahan. Meski Nasionalisme baru ini tak sekuat yang lama akan tetapi ia

²⁶ Imam Badruddin Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad Alaini, *Umdatul Qori*, (Kairo: Darul Kutub Al Ilmiyah, 755H), hlm. 255

²⁷ Bukhori, *Terjemah Hadits Shahih Bukhori* jilid 4, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1992), cet. ke-13, hlm 125.

bisa menggerakkan komunalisme. Memudarnya nasionalisme ini merupakan gejala umum yang terjadi di negara berkembang sebagaimana India dan Amerika Latin.

Stephen Ryan sebagaimana dikutip Askuri mengemukakan faktor-faktor yang mendorong konflik antar etnis di dunia adalah:

1. Berakhirnya perang dingin yang justru mendorong konflik antar etnis di negara dunia ketiga,
2. Pembangunan ekonomi yang tidak merata.
3. Identitas nasional yang belum mantap.²⁸

Komunalisme seperti itulah yang kemudian menimbulkan banyak masalah pada abad ini, baik di wilayah internasional ataupun nasional. Agama sering dianggap sebagai salah satu faktor yang melunturkan nasionalisme tersebut. Sempitnya pandangan agama dinilai menjadi penyebab banyak konflik antar agama di seluruh dunia. Sebagai contoh adalah keinginan pemberlakuan ajaran agama tertentu sebagai landasan negara dengan konsekuensi terjadinya diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas.

Gerakan itu kemudian berbaur dengan-atau menggunakan kendaraan institusi yang kalau ditelusuri labelnya adalah komunitas keagamaan atau kesukuan, secara horisontal. Tapi secara vertikal ada muatan baru lagi yaitu sebagai instrumen dari mereka yang tertindas.²⁹ Lebih lanjut dijelaskan bahwa gerakan komunalisme dan primordialisme keagamaan sebenarnya merefleksikan realitas keterpinggiran dan ketertindasan yang dihadapi oleh - terutama— umat Islam.³⁰

Saat ini kekerasan demi kekerasan atas nama agama semakin menjadi. Kekerasan tersebut pada awalnya kekerasan dengan konflik politik atau ekonomi, akan tetapi kemudian berlanjut dengan konflik SARA. Dalam banyak peristiwa sebenarnya tidak serta merta bisa dikaitkan dengan ajaran

²⁸ Asykuri Ibn Chamim et al, *op.cit.* hlm 215-216.

²⁹ Zainuddin Maliki, *op.cit.*, hlm. xxxiii.

³⁰ *Ibid*, xxxv.

Islam. Hal ini karena pada intinya Islam juga mengutamakan hubungan yang harmonis dengan sesama manusia.

Di antara kasus kerusuhan yang memiliki potensi perpecahan bangsa Indonesia seperti kasus Ambon yang bermula dari pemerasan sekelompok pemuda pendatang kepada sopir penduduk asli, yang kemudian melakukan pembalasan pada saat sholat Id, dan Sambas, ketapang yang bermula pada dari doa bersama umat Kristen di Kupang

Meski konflik tersebut dipicu oleh masalah lain akan tetapi agama telah mampu menjadi alasan terjadinya konflik. Agama memang tak dapat disalahkan, akan tetapi jawaban seperti itu saja tidak cukup dan justru terlihat sebagai apologi belaka. Karena bagaimanapun juga agama dengan ajaran-ajaran yang dipahami dan diajarkan para pemeluknya sedikit banyak bertanggungjawab atas masalah-masalah tersebut.

Suatu konflik sosial biasanya terjadi karena bertemunya empat elemen utama dalam waktu bersamaan. Adapun empat elemen itu ialah *facilitating contexts* (konteks pendukung), *core of conflict* (akar konflik), *fuse factors* (sumbu), dan *triggering factors* (faktor pemicu).³¹

Kalau dikaitkan dengan masalah gerakan separatis atas nama agama, maka dalam masalah disintegrasi bangsa ini setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, konteks pendukung berupa perasaan ketidakadilan yang mereka terima. Hal ini bisa karena adanya kesenjangan sosial dan ekonomi atau karena perlakuan yang dianggap merugikan dibanding dengan kelompok lain dan lain sebagainya.

Adapun akar konflik bisa berupa penderitaan sosial yang mereka rasakan bersama karena kesenjangan ataupun ketidakadilan tersebut. Sedangkan untuk faktor sumbunya bisa diartikan sebagai adanya perasaan chauvinisme atau nasionalisme sempit terhadap kelompoknya. Sedangkan masalah ini akan menyala ketika mendapat faktor pemicu seperti adanya momentum tertentu yang menyulut konflik. Apa yang saya jelaskan tersebut

³¹ Moh Sholeh Isre (ed), *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: depag RI), 2003, hlm 5.

adalah sebagian kecil contoh dari alasan dan penyebab konflik kebangsaan kita.

”Realitas secara obyektif memperlihatkan adanya persoalan identitas yang dirasakan terancam.”³² Selanjutnya dicontohkan seperti identitas kekristenan atau muslim yang terancam akan tetapi diselesaikan dengan mengancam dan mendekonstruksi identitas atau simbol golongan lain.

Salah satu manifestasi nasionalisme adalah menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak menonjolkan chauvimisme pada golongan suku, agama atau ras tertentu. Oleh karena itu, bukan nasionalis ketika sekelompok agama misalnya menonjolkan keunggulan klaim keagamaannya dan meremehkan agama lain sehingga menimbulkan pertikaian antar warga. Dengan begitu, kerukunan umat beragama merupakan salah satu penyangga nasionalisme.

Tujuan kerukunan umat beragama setidaknya ada empat hal. Pertama, demi kelestarian dan kelangsungan hidup Pancasila, kedua, untuk meluhurkan Tuhan sang pencipta dan keluhuran martabat umat manusia, ketiga, uniformitas dan pluriformitas, dan keempat demi menghadapi tantangan masa depan.³³

Disinilah arti penting wawasan kebangsaan sebagai pembentuk pandangan jangka panjang nasional. “Wawasan kebangsaanlah yang akan menyadarkan semua warga negara akan pentingnya arti hidup bersama atas dasar persamaan status dan hak di muka undang-undang, yang akan menjamin ketentraman hidup seluruh bangsa.”³⁴

Wawasan kebangsaan juga akan mendorong pemanfaatan sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama, dan mampu mendudukkan suatu bangsa sejajar dengan bangsa lain serta sebagai solusi atas masalah berat seperti lingkungan hidup, teknologi yang tertinggal. Dengan begitu akan

³² Zainuddin Maliki *op.cit*, hlm. 188

³³ Imam Kuseno Mihadjo, “Bingkai Teologis Kerukunan Umat beragama, dalam *Agama-Hak Azasi Manusia dan Keutuhan Bangsa*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000), hlm.88-89.

³⁴ Soerjanto Poespowardojo (*ed*), *op.cit*, hlm.6

tercipta keadilan sosial. Keadilan sosial inilah inti dari ajaran kitab suci Al Quran. Hal ini sebagaimana pendapat Fazlur Rahman yang dikutip Qodri Azizy menyatakan bahwa inti ajaran kitab suci Al Quran adalah ajaran moral yang menekankan ide-ide tentang keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan egalitarianisme.³⁵

Penumbuhan kesadaran akan perlunya wawasan kebangsaan ternyata menyentuh hakikat inti dari kehidupan umat manusia, yaitu menyangkut kepentingan yang saling berbeda secara rasional. Artinya, proses membentuk kehidupan bersama memerlukan kesediaan untuk saling bertolak-angsur, dan saling memberi dan menerima. Kesediaan untuk berkorban bagi kepentingan sesama warga sebangsa, karena pada hakikatnya juga akan berarti menjaga kepentingan masing-masing juga tentunya adalah kesadaran yang hanya akan mungkin tumbuh dalam sebuah wawasan kebangsaan yang cukup kuat. Kesadaran seperti itu akan tumbuh, apabila dapat dikembangkan sikap memahami bahwa kemampuan mempertahankan unikum suatu golongan hanya dapat dikembangkan dalam kebersamaan dengan golongan-golongan lain. Dalam memelihara spektrum variasi perbedaan barulah dapat dilihat unikum masing-masing.³⁶

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Sebagaimana yang telah diungkapkan Gus Dur. Catatan sejarah telah menunjukkan manusia Indonesia mampu menjadi orang-orang revolusioner dalam sekejap mata, kalau mereka ingin. Tetapi manusia Indonesia sebagai bangsa cukup bersabar untuk menumbuhkan pendekatan gradual mereka sendiri untuk mengangkat derajat mereka dari belenggu sejarah.” Tambahnya lagi ”Kesadaran kita sebagai suatu bangsa merupakan salah satu syarat keberadaan kita, oleh sebab itu nilai wawasan kebangsaan tidak dapat kita terima sebagai *taken for granted* tetapi sebagai suatu wawasan yang terus-menerus menjiwai aktivitas kita untuk hidup sebagai bangsa.³⁷ Pendapat lain menyebutkan “*No idea has*

³⁵ Qodri Azizy, *Pendidikan Agama Untuk Membangun Etika Sosial*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2002), hlm. 90.

³⁶ Soerjanto Poespowardojo (*ed*), *op.cit*, hlm.7

³⁷ H.A.R Tilaar, *op.cit*, hlm. 232.

had so profound an influence on the refiguration of Muslim politics in modern Indonesia as has nationalism.”³⁸

“Stabilitas tidak bisa dibentuk dengan menghadirkan instrumen-instrumen ideologi maupun cara-cara represif yang *monolithic* dan *monovalent* yang membikin sumpek ruang gerak pluralitas etnik dan agama.”³⁹ Dengan kata lain stabilitas nasional akan terwujud dengan memberikan ruang untuk pembentukan identitas kultural yang plural dengan kesadaran tinggi untuk saling menghormati, apresiasi dan toleransi.

Prinsip ini juga tidak bertentangan dengan konsep Islam, karena sesungguhnya setiap agama juga megajarkan pada pentingnya toleransi dan hubungan kemanusiaan yang penuh cinta kasih, yang jika itu dibawa ke arena politik akan memunculkan perilaku politik yang terbuka, toleran, dan responsif terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang universal. Pluralisme yang didukung oleh keyakinan keagamaan yang inklusif seperti ini akan menjadi faktor penting bagi tegak dan terjaganya demokrasi politik.⁴⁰

E Arti Penting Pendidikan Islam dan Penguatan Nasionalisme Indonesia

1. Definisi Pendidikan Islam

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴¹ Di lain pihak Muhaimin mendefinisikan ”pendidikan adalah upaya normatif untuk membantu orang lain berkembang ke tingkat normatif lebih baik.”⁴² Sedangkan menurut Qodri Azizy pendidikan

³⁸ Robert W. Hefner, *Civil Islam*, (USA: Princeton University, 2000), hlm. 37.

³⁹ Zainuddin Maliki, *op.cit*, hlm. 189.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. xl

⁴¹ UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.

⁴² Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2003), hlm. 62

sebagai suatu usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian peserta didik.⁴³

Pendidikan Islam itu sendiri sesuai dengan fitrah manusia, seperti apa yang dikemukakan Muhammad Munir Mursyi:

التربية الإسلامية تربية لفطرة الإنسان لان الإسلام دين الفطرة وكل أو امره ونواهيته وتعاليمه تعترف بهذه الفطرة⁴⁴

“Pendidikan Islam adalah pendidikan fitrah manusia karena sesungguhnya Islam itu adalah agama fitrah dan segala perintahnya dan larangannya serta kepatuhannya dapat menghantarkan mengetahui fitrah ini.”

Adapun pendidikan keagamaan sebagaimana tertera dalam UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 30 berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Dalam PP 55 tahun 2007 telah disebutkan bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Selain itu pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.⁴⁵ Fungsi pendidikan Islam adalah melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai ilahi dan insani sebagaimana terkandung dalam kitab-kitab ulama terdahulu. Sedangkan hakekat tujuan pendidikan Islam adalah terwujudnya penguasaan ilmu agama Islam serta tertanamnya perasaan agama yang mendalam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁶ Menurut pendapat lain

⁴³ Qodri Azizy, *Membangun Integritas Bangsa*, (Jakarta: Renaisan, 2004), hlm. 73.

⁴⁴ Muhammad Munir Mursyi, *At-Tarbiyah al-Islamiyah*, (Kairo: Darul Kutub, 1977), hlm. 25.

⁴⁵ PP Nomor 55 tahun 2007.

⁴⁶ Muhaimin, *op.cit*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2003), hlm. 17.

“The first highest goal of islamic education is moral and spiritual training”⁴⁷

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mengembangkan potensi manusia supaya bisa menjadi manusia yang seutuhnya berdasarkan konsep agama Islam, yaitu menjadi pribadi yang beriman dan bertaqwa sehingga mampu menjalankan tugas kemanusiaan yaitu menjadi khalifah di bumi. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Hud ayat 61.

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya). (Q.S Hud Ayat 61)

Sebagaimana yang dipahami Quraish Shihab kekhalifahan mengharuskan empat sisi yang saling terkait. Yaitu, pemberi tugas, penerima tugas, tempat dan meteri penugasan.⁴⁸ Keberhasilan menjadi khalifah bisa dicapai jika empat unsur tadi dipenuhi. Yaitu dengan manusia atau sekelompok manusia yang menjalankan tugas sebagaimana diperintahkan Allah yang juga harus memperhatikan kondisi lingkungan.

Oleh karena itu, tiap wilayah dapat memiliki tujuan pendidikan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan lingkungannya yang berdasar identitas, pandangan hidup, dan nilai yang diakui pada masyarakat atau lingkungan tersebut. Adapun dalam konteks nasional dapat dinyatakan bahwa pendidikan agama juga sangat berperan dalam pembentukan masyarakat yang memiliki kecintaan terhadap bangsa.

2. Fungsi Pendidikan Islam Dalam Menanamkan Nilai Nasionalisme

⁴⁷ Muhammad Athiyah al-Abrosyi, *Education in Islamiyyah*, (The Suprema Council for Islamic Affairs, t.t), hlm. 11.

⁴⁸ Quraish Shihab, *Membumikan Al Quran*, (Bandung: Mizan, 2003), cet XXVII, hlm 173.

Pendidikan telah diakui memiliki peran sentral dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dalam kaitannya dengan politik, ia berpengaruh pada pembentukan manusia sebagai anggota sebuah bangsa yang baik dan bertanggungjawab.

Pendidikan pada intinya merupakan proses penanaman dan pengembangan nilai kepada peserta didik. Nilai-nilai atau norma ini bisa ditransfer melalui guru, orang tua atau bahkan dari berbagai media massa dan elektronik yang saat ini berkembang pesat. nilai didefinisikan Milton Rokeach dan James Bank sebagai: "Suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang sistem kepercayaan dalam mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan"⁴⁹

Sedangkan Sidi Gazalba mendefinisikan "nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak punya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki dan tidak dikehendaki disenangi dan tidak disenangi."⁵⁰ Dalam kehidupan nilai memiliki berbagai fungsi seperti standar perilaku, dasar penyelesaian konflik dan pembuatan keputusan, sumber motivasi, dasar penyesuaian diri, dasar perwujudan diri.⁵¹

Dengan begitu nilai merupakan suatu penghayatan atas suatu kepercayaan mengenai sesuatu yang pantas dan tidak pantas, suatu yang baik dan buruk atas sesuatu. Adapun yang dimaksud dengan nilai-nilai nasionalisme adalah segala ajaran yang di dalamnya terkandung muatan kecintaan terhadap bangsa seperti rela berkorban, mementingkan bangsa, anti perpecahan atau disintegrasi bangsa dan lain sebagainya.

Pengembangan pendidikan Agama Islam di sekolah, madrasah, pesantren atau masyarakat memiliki potensi untuk mewujudkan integrasi

⁴⁹ Chabib Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 60.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 61.

⁵¹ Qodri Azizy, *Membangun Integritas Bangsa*, *op.cit*, hlm. 73.

atau disintegrasi. Keadaan ini sangat dipengaruhi oleh: (1) pandangan teologi agama dan doktrin ajarannya; (2) sikap dan perilaku pemeluknya dalam memahami dan menghayati agama tersebut; (3) lingkungan sosio-kultural yang mengelilinginya; (4) peranan dan pengaruh pemuka agama, termasuk guru agama, dalam mengarahkan pengikutnya.⁵² Hal ini karena agama sarat dengan ajaran yang sangat fundamental yang diturunkan Tuhan kepada manusia. Akan tetapi untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran tersebut tidak dapat lepas dari penafsiran manusia sebagai subjek. Oleh karena itu keragaman pandangan tidak dapat dihindari.

Dari sini sebenarnya para guru Agama Islam dan pendakwah memiliki dua tanggung jawab yaitu mengemban misi keagamaan dan keilmuan. Misi keagamaan diwujudkan dalam bentuk membangun citarasa dan perilaku beragama yang baik, loyal, komitmen dan penuh dedikasi. Sedangkan misi keilmuan diwujudkan dengan membangun pemahaman dan sikap yang rasional, kritis, dinamis dan obyektif serta berwawasan luas.⁵³

Ada berbagai metode untuk menanamkan nilai dalam pendidikan. Adapun metode yang digunakan untuk memberi pemahaman tentang nilai tersebut bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti keteladanan, pengajaran, pengalaman khusus, hukuman dan ganjaran, situasi lingkungan dan kelembagaan, dan layanan bimbingan.⁵⁴

Sedangkan salah satu pendekatan yang tepat dalam menanamkan nilai ini dengan menggunakan pendekatan holistik dengan pemberdayaan pribadi sebagai fokus utamanya. Yaitu pendidikan harus dipandang sebagai satu keutuhan dalam berbagai aspek dan dimensi seperti landasan, tujuan, isi, strategi, pelaksanaan, manajemen, lingkungan pendidikan dsb.⁵⁵

⁵² Muhaimin, *op.cit*, hlm. 59.

⁵³ *Ibid* hlm. 68.

⁵⁴ Qodri Azizy, *op.cit*, hlm. 72-73.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 73

Penghayatan nilai-nilai dari masyarakat sangat berbeda, tergantung pada tingkat perkembangan kejiwaannya. Akan tetapi keadaan pendidikan dalam menanam nilai cenderung formalistik dan tidak kontekstual. Padahal dalam hal penanaman nilai ini yang perlu ditekankan adalah penghayatan dan pengamalannya dalam sendi-sendi kehidupan.

Di tengah kondisi Bangsa Indonesia yang plural diharapkan Pendidikan Agama Islam mampu mengajarkan para generasi muslim untuk tetap menjaga persatuan bangsa. Atau meminjam istilah Muhaimin *ukhuwah islamiah* dalam arti luas, yaitu persaudaraan antar sesama manusia untuk membentuk kesalehan pribadi dan sosial.

Kesalehan pribadi mengandung makna seseorang yang peduli terhadap kebaikan, yang memiliki komitmen untuk memperbaiki, meningkatkan serta mengembangkan potensi dan kreatifitas dirinya sekaligus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya secara berkelanjutan. Sedangkan kesalehan sosial mengandung makna orang tersebut memiliki kepedulian untuk berhubungan secara harmonis dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya, sekaligus mampu ikut bertanggungjawab terhadap pengembangan masyarakatnya atau memiliki keunggulan *partisipatoris* yang dilandasi oleh tingginya kualitas iman dan takwa terhadap Allah swt.⁵⁶

Dengan begitu maka pendidikan Agama Islam diharapkan mampu menghindari ”(1) menumbuhkan semangat fanatisme buta; (2) menumbuhkan sikap intoleran di kalangan peserta didik dan masyarakat Indonesia dan; (3) memperlemah kerukunan hidup beragama serta persatuan dan kesatuan nasional.”⁵⁷

Tipologi yang perlu dikembangkan di Indonesia adalah rekonstruksi sosial yang teosentris, dengan landasan pemikiran bahwa: (1) bangsa Indonesia mengakui Pancasila sebagai dasar negara, sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan keharusan bangsa Indonesia untuk bersikap teosentris. Dalam konteks ajaran Islam

⁵⁶ Muhaimin, *op.cit*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2003), hlm. 60.

⁵⁷ *Ibid*.

sila tersebut dimaknai dengan kosep tauhid, yang mencakup konsep-konsep *tauhid uluhiyah*, *rububiyah*, *mulkiyah* dan *rahmaniyah*; (2) bangsa Indonesia hidup dalam *pluralisme* yang sangat rentan terhadap timbulnya konflik-konflik, namun demikian mereka bertekad untuk ber-Bhinneka Tunggal Ika. Pengembangan Pendidikan Islam berusaha menciptakan ukhuwah islamiyah dalam arti luas, yang mampu membentuk manusia yang memiliki kesalehan pribadi sekaligus kesalehan sosial, yakni melalui daya kreativitasnya memiliki keunggulan partisipatoris yang dilandasi oleh tingginya kualitas iman dan taqwa terhadap Allah swt; dan (3) terdapat beberapa kekuatan global yang hendak membentuk dunia masa depan, yang menggarisbawahi perlunya pendidikan Islam untuk menyiapkan peserta didik yang unggul dalam iptek, produktif dan kompetitif sehingga memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannnya dalam kehidupan bersama dan kesadaran bersama dalam alam demokratis.⁵⁸

Kebijakan yang dapat dilakukan untuk menguatkan nasionalisme dalam aspek agama sebagaimana kesimpulan dalam penelitian Tatang Muttaqin adalah sebagai berikut: a) Mengembangkan materi agama yang komprehensif sehingga materi ini dapat menampilkan wajah agama sebagai karunia bagi pemeluk agama tersebut maupun pemeluk agama lain (*rahmatan lil alamin*) di dalam semua bidang kehidupan. b) Mengembangkan metode pengajaran agama yang kritis, dialogis, dan aplikatif dengan tetap berpegang pada standar kaidah-kaidah agama. c) Menciptakan kehidupan keagamaan (intra dan antarumat beragama) yang interaktif, dialogis dan toleran sehingga menumbuhkan semangat kebersamaan dan kerjasama.⁵⁹ Oleh karena itu, pembenahan ini sangat penting dilakukan. Adapun yang terpenting adalah mengajarkan ajaran-ajaran universal yang kontekstual. Hal ini karena pesan-pesan Allah yang tersusun dalam ayat-ayat Al Quran sangat sarat makna akan tetapi perlu

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 49.

⁵⁹ Tatang Muttaqin, *ibid*.

disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Setelah hal ini dipahami, yang selanjutnya adalah menyampaikan pesan itu melalui media pendidikan dan pengajaran yang efektif dan efisien.

BAB III

KONSEP ABDURRAHMAN WAHID TENTANG NASIONALISME DAN ARTI PENTING PENDIDIKAN ISLAM

A. Biografi KH Abdurrahman Wahid

Nama asli dari KH Abdurrahman Wahid adalah Abdurrahman Addakhil. Ia kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren untuk anak laki-laki kiai. Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara yang dilahirkan di Denanyar Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Gus Dur adalah keturunan K.H. Wahid Hasyim yang merupakan putra K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) dan pendiri Pesantren Tebu Ireng Jombang. Adapun ibundanya, Ny. Hj. Sholehah adalah putri pendiri Pesantren Denanyar Jombang, K.H. Bisri Syansuri. Kakek dari pihak ibunya ini juga merupakan tokoh NU, yang menjadi Rais 'Aam PBNU setelah K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Dengan demikian, Gus Dur merupakan cucu dari dua ulama NU sekaligus, dan dua tokoh bangsa Indonesia.¹ Bahkan jika dirunut lebih jauh ia merupakan keturunan Brawijaya IV yaitu Lembu Peteng, dengan melalui dua jalur Ki Ageng Tarub I dan Joko Tingkir.²

Pada tahun 1949 ayahnya diangkat sebagai Menteri Agama pertama, sehingga keluarga Wahid Hasyim dan Gus Dur kecil pindah ke Jakarta. Dengan demikian suasana baru telah dimasukinya. Tamu-tamu, yang terdiri dari para tokoh-dengan berbagai bidang profesi yang sebelumnya telah dijumpai di rumah kakeknya, terus berlanjut ketika ayahnya menjadi menteri agama. Secara tidak langsung, Gus Dur juga mulai berkenalan dengan dunia politik yang didengar dari kawan ayahnya yang sering berkunjung dan berdiskusi di rumahnya. Meski pada masa itu pergantian kabinet sangat sering terjadi, akan tetapi sang ayah tetap bisa bertahan dengan jabatannya, sampai

¹ <http://www.gusdur.net> diambil pada 11 Desember 2007

² Fuad Anwar, *Melawan Gus Dur*, (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2004), hlm. 4.

kemudian masalah haji membelitnya hingga Wahid Hasyim diberhentikan dari jabatannya.

Pada bulan April 1953, Gus Dur pergi bersama ayahnya mengendarai mobil ke daerah Jawa Barat untuk meresmikan madrasah baru. Di perjalanan antara Cimahi dan Bandung, mobilnya mengalami kecelakaan. Gus Dur bisa diselamatkan, akan tetapi ayahnya meninggal. Kematian sang ayah tersebut membawa pengaruh tersendiri dalam kehidupannya. Kecelakaan itu sangat mempengaruhi kebiasaan dan sikapnya yang tidak menentu dan lebih suka mengambil kesimpulan setelah memilih-milih dari berbagai sumber.³ Sifatnya yang ekletis ini sangat mempengaruhi pola pikirnya yang tidak pernah murni satu aliran pemikiran, akan tetapi merupakan hasil dialektika dan sintesa pemikiran yang rumit.

Jenjang pendidikan yang ia lalui dimulai dari Sekolah Rakyat di Jombang, kemudian dilanjutkan di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama di Jakarta, karena mengalami tinggal kelas sehingga di sekolah ini hanya berjalan satu tahun. Prestasi sekolah yang memburuk ini banyak diduga karena rasa kehilangan yang teramat sangat atas kematian sang ayah. Kemudian ia pindah ke Yogyakarta sambil belajar di Pesantren Krapyak. Setelah lulus SMEP pada 1957, ia masuk di Pesantren Tegal Rejo, Magelang, Jawa Tengah. Di bawah asuhan Kyai Chudhori, ia mengenal dunia sufisme. Setelah dua tahun, ia kembali ke Jombang, tinggal di Pesantren Tambak Beras dan mengajar. Di tempat ini Gus Dur mengenal Sinta Nuriyah yang juga seorang anak kyai besar, sebagai seorang murid yang cantik dan cerdas. Gus Dur merasa tertarik, sehingga menikahinya.

Pada usia 22 tahun ia berhaji dan melanjutkan belajarnya ke Timur Tengah. Akan tetapi sebelum ia masuk Universitas Al Azhar, ia harus menempuh semacam pendidikan aliyah yang membuatnya bosan karena harus mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari di Indonesia. Studinya di Al Azhar ini tidak pernah selesai. Pada tahun 1966 ia pindah ke Irak dan masuk pada Fakultas Sastra pada *Departemen of Religion* di Universitas

³ Azyumardi Azra, *Islam Substantif*, (Jakarta: Mizan, 2000), hlm. 399

Bagdad sampai tahun 1970. setelah lulus ia menetap di Belanda selama enam bulan dan mendirikan Perkumpulan Pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia yang tinggal di Eropa. Pada Juni 1971 ia kemudian dipanggil pulang ke Jombang.⁴

Sepulang dari pegembaraanya mencari ilmu, Gus Dur memilih menjadi guru. Pada tahun 1971, tokoh muda ini bergabung di Fakultas Ushuludin Universitas Tebu Ireng Jombang. Setelah tiga tahun ia diangkat menjadi sekretaris Pesantren Tebu Ireng.

Saat itu ia kembali menekuni bakatnya sebagai penulis dan kolumnis. Lewat tulisan-tulisan tersebut gagasan pemikiran Gus Dur mulai mendapat perhatian banyak. Djohan Efendi, seorang intelektual terkemuka pada masanya, menilai bahwa Gus Dur adalah seorang pencerna, mencerna semua pemikiran yang dibacanya, kemudian diserap menjadi pemikirannya tersendiri. Sehingga tidak heran jika tulisan-tulisannya jarang menggunakan *foot note*. Dari sini pula Gus Dur mulai sering mendapatkan undangan menjadi nara sumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya ia banyak terlibat dalam kegiatan LSM. Pertama di LP3ES bersama Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin dan Adi Sasono dalam proyek pengembangan pesantren, kemudian Abdurrahman Wahid mendirikan P3M yang juga dimotori oleh LP3ES.

Pada tahun 1979 Gus Dur pindah ke Jakarta. Pada awalnya ia merintis Pesantren Ciganjur yang sampai sekarang tetap dikelolanya. Sementara pada awal tahun 1980 Gus Dur dipercaya sebagai wakil katib syuriah PBNU. Disini Gus Dur terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang serius mengenai masalah agama, sosial dan politik dengan berbagai kalangan lintas agama, suku dan disiplin. Gus Dur semakin serius menulis dan bergelut dengan dunianya, baik di lapangan kebudayaan, politik, maupun pemikiran keislaman. Ia diangkat pula sebagai anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada tahun 1983. Ia juga menjadi ketua juri dalam Festival Film Indonesia (FFI) tahun 1986, 1987. Akan tetapi perannya dalam DKJ dan FFI mendapat kritikan dari banyak

⁴ Fuad Anwar, *op.cit*, hlm. 5-8.

masyarakat, karena dianggap menyimpang dari kapasitasnya sebagai seorang kyai besar.

Pada tahun 1984 Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim *ahl hall wa al-'aqdi* yang diketuai K.H. As'ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan Ketua Umum PBNU pada muktamar ke-27 di Situbondo. Jabatan tersebut kembali dikukuhkan pada muktamar ke-28 di pesantren Krapyak Yogyakarta (1989), dan muktamar di Cipasung Jawa Barat (1994). Selain itu selama kurun waktu 1989-1993 ia menjadi anggota MPR-RI. Jabatan ketua umum PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat presiden Republik Indonesia ke-4 melalui Partai Kebangkitan Bangsa yang dipimpinnya. Meskipun sudah menjadi presiden, sifatnya yang eksentrik tidak hilang, bahkan semakin diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Dahulu, mungkin hanya masyarakat tertentu, sekarang seluruh bangsa Indonesia ikut memikirkan kontroversi gagasan yang dilontarkannya.

B. Corak Pemikiran Gus Dur

Dua hal yang paling berpengaruh terhadap dirinya adalah pesantren dan Nahdlatul Ulama. Kedua hal inilah yang kelak mempengaruhi pemikirannya mengenai keislaman, budaya, sosial, ekonomi dan politik yang mendorong kontribusi Islam pada pluralisme, keadilan sosial dan demokrasi.⁵ Meski begitu, Gus Dur memiliki perjalanan hidup yang kompleks dan rumit. Ia bertemu dengan berbagai macam orang yang hidup dengan latar belakang ideologi, budaya, kepentingan, strata sosial dan pemikiran yang berbeda. Dari segi pemahaman keagamaan dan ideologi, Gus Dur melintasi jalan hidup yang lebih kompleks, mulai dari yang tradisional, ideologis, fundamentalis, sampai modernis dan sekuler. Dari segi kultural, Gus Dur mengalami hidup di tengah budaya Timur yang santun, tertutup, penuh basa-basi, sampai dengan budaya Barat yang terbuka, modern dan liberal. Demikian juga persentuhannya

⁵ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), hlm xv.

dengan para pemikir, mulai dari yang konservatif, ortodoks sampai yang liberal dan radikal semua dialami.

Lembaga pesantren telah membentuk karakter keagamaan yang penuh etik, formal, dan struktural. Sementara pengembaraannya ke Timur Tengah telah mempertemukan Gus Dur dengan berbagai corak pemikirann agama, dari yang konservatif, simbolik-fundamentalis sampai yang liberal-radikal. Dalam bidang kemanusiaan, pikiran-pikiran Gus Dur banyak dipengaruhi oleh para pemikir Barat dengan filsafat humanismenya. Secara rasa maupun praktek prilaku yang humanis, pengaruh para kyai yang telah mendidik dan membimbingnya mempunyai andil besar dalam membentuk pemikiran dan tingkah laku Gus Dur menjadi sangat peka terhadap sentuhan-sentuhan kemanusiaan.

Dari segi kultural, Gus Dur melintasi tiga model lapisan budaya. Pertama, Gus Dur bersentuhan dengan kultur dunia pesantren yang sangat hierarkis, tertutup, dan penuh dengan etika yang serba formal; kedua, dunia Timur yang terbuka dan keras; dan ketiga, budaya Barat yang liberal, rasioal dan sekuler. Semua hal tersebut tampak masuk dalam pribadi dan membetuk sinergi. Sampai sekarang masing-masing melakukan dialog dalam diri Gus Dur. Inilah sebabnya mengapa Gus Dur selalu kelihatan dinamis dan sulit dipahami atau cenderung bersifat akletis. Kebebasannya dalam berpikir dan luasnya cakrawala pemikiran yang dimilikinya melampaui batas-batas tradisionalisme yang dipegangi komunitasnya sendiri.

Kegemarannya dalam dunia tulis menulis juga merupakan bukti kualitas intelektualnya. Akan tetapi sayangnya Gus Dur hanya gemar menulis dalam bentuk kolom atau artikel, ia sampai saat ini belum pernah menuliskan idenya dalam bentuk buku yang utuh. Biasanya buku yang ia tuliskan hanya berupa bunga rampai dari berbagai artikelnnya Akan tetapi hal ini bukanlah menjadi sebuah masalah karena Gus Dur merupakan penulis yang sangat produktif. Sampai sekarang tulisannya sudah lebih dari 500 buah. Dari tulisan-tulisan tersebut pandangan-pandangan Abdurrahman Wahid dengangan jelas dapat ditelusuri. Selain itu, banyak sekali buku-buku mengenai pribadi dan

pandangan-pandangannya yang ditulis orang lain baik dalam maupun luar negeri. Greg Barton dengan bukunya "*The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*" merupakan salah satu contohnya buku terlengkap mengenainya.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Gus Dur memiliki pemikiran yang kontekstual. Hal ini bisa dilihat dari pemahaman teks keagamaan beliau yang lengkap dengan kondisi sosial dan politik yang melingkupinya. Ia juga tidak mau terjebak pada verbalitas dan rigiditas teks.⁶ Oleh karena itu ia sangat berhati-hati dalam membedakan inti ajaran Islam dan bias kultur Arab.

Dari sini bisa dipahami mengapa pemikiran Gus Dur terasa sangat dinamis meski cenderung rumit dipahami masyarakat umum. Banyak sekali pendapat Gus Dur yang sangat kontroversial dan tidak jarang bertolak belakang dengan pendapatnya terdahulu. Karena itu tidak jarang cendekiawan lain yang tidak sepaham dan menyebutnya sebagai orang yang tidak konsisten. Akan tetapi banyak pula yang menyanjungnya sebagai ilmuwan yang mampu memahami sesuatu secara mendalam. Sedangkan bagi masyarakat umum, inkonsistensi itu banyak dinilai sebagai perkataan kyai yang tidak seharusnya dibantah.

Mengenai kharisma Gus Dur di mata masyarakat umum, Azra berpendapat bahwa telah terjadi proses mitologisasi terhadap Gus Dur. Mitologisasi itulah yang kemudian menjadikan Gus Dur jauh dari kritik oleh masyarakat. Mitogisasi ini bisa dilihat dari julukan yang diberikan kepadanya seperti yang diberikan Emha Ainun Nadjib yang mengatakan Gus Dur laksana sebuah begawan atau wali atau yang dikatakan Gus Mus bahwa rahasia Allah ada empat macam yaitu rejeki, jodoh, usia manusia dan yang keempat adalah Gus Dur. Azra lebih menilai Abdurrahman Wahid sebagai cendekiawan muslim sekaligus politisi. namun, kecondongannya lebih ke politisi. Gus Dur juga dinilai tidak mampu menjadi representasi seluruh muslim Indonesia, ia hanya mungkin menjadi representasi NU atau PKB.⁷ Mitologisasi ini memang

⁶ *Ibid*, hlm xxv.

⁷ Azyumardi Azra, *op.cit*, hlm. 369.

mungkin terjadi, karena para pendukung Gus Dur kebanyakan adalah golongan muslim tradisional yang memiliki kepatuhan tinggi terhadap kyai dan keturunannya.

Azra juga berpendapat bahwa Gus Dur bersifat ekletis dan suka berubah-ubah dan melawan mainstream yang ada.⁸ Karena itu tidak heran saat orang kebanyakan memilih ‘A’ ia justru mendukung ‘B’. Hal inilah yang sering membingungkan masyarakat, seperti apa yang terjadi saat ini. Dimana kebanyakan orang menghujat aliran Ahmadiyah yang dianggap sesat, justru Gus Dur mati-matian membelanya. Menurut Azyumardi Azra sifat Gus Dur yang berubah-ubah itu karena banyak terpengaruh oleh pribadi yang ekletis tadi, bukan sebagai taktik politik atau keilmuan.⁹ Meski begitu Gus Dur dinilai sangat akomodatif dan adaptif terhadap minoritas seperti yang ia lakukan terhadap etnis China atau Konghucu. Meski begitu nuraninya tetap memperhatikan kepentingan umat Islam atau NU secara khusus, dan tidak mungkin memberikan konsesi pada pihak lain lebih besar.¹⁰

C. Peran Penting dalam Konteks Kebangsaan dan Keagamaan

Ia memimpin NU selama 15 tahun dalam tiga periode berturut-turut. Hal ini merupakan pengakuan masyarakat akan kapabilitas dan loyalitasnya pada organisasi dan dunia Islam. Dari organisasi inilah namanya besar sehingga mendunia dan terlibat berbagai organisasi sosial, politik dan keagamaan baik nasional ataupun internasional. Dalam lingkup politik nasional, karirnya mulai berkembang saat ia mendirikan Partai kebangkitan Bangsa (PKB) yang kemudian ia pimpin dan mampu menghantarkannya pada posisi puncak kepemimpinan Negara Indonesia.

Melalui taktik politik yang rumit akhirnya ia mampu menjabat sebagai presiden Republik Indonesia. Akan tetapi, sebelum genap 2 tahun jabatan itu harus dilepas karena akumulasi masalah yang dihadapi termasuk dari lawan

⁸ *Ibid*, hlm. 381.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 389.

politiknya.¹¹ Keputusan ini ia ambil dengan pertimbangan menghindari konflik berdarah di Indonesia karena jika dia tetap mempertahankan posisi tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi pertikaian nasional antara pihak yang mendukungnya dan kelompok yang menghendaki dirinya turun.

Ia dikenal sebagai tokoh dunia yang sangat menguasai masalah kerukunan hidup umat beragama, pluralisme dan penegakan hak asasi manusia dan *civil society*. Ia banyak terlibat dalam upaya penyelesaian berbagai konflik yang mengatasnamakan agama, fundamentalisme agama dan terorisme.¹² Ia memiliki pandangan bahwa sesama manusia harus saling mengingatkan, bahwa kita memiliki kewajiban agar apapun perbedaan pendirian kita, kita harus hidup bersama dalam satu ikatan. Bahwa perbedaan demi perbedaan yang ada, seharusnya mendorong munculnya sikap yang arif bijaksana.¹³ Pendapat ini senada dengan pemikiran Anand Krishna yang menyatakan bahwa 'perbedaan' yang ada bukanlah memisahkan orang perorang, akan tetapi justru 'perbedaan' itu menyatukan, sebagaimana laut menyatukan pulau-pulau. Pandangan ini pula yang menjadi dasar pembelaan Gus Dur atas keberadaan ajaran Ahmadiyah yang menurut fatwa MUI sesat dan berdasar SKB tiga menteri harus dibekukan.

Bagi kalangan minoritas, ia dianggap sebagai pembela utama eksistensi mereka. Masyarakat Papua, etnis Tionghoa, atau umat Nasrani menganggap Wahid sebagai pembela di tengah tentangan dan ancaman politis masyarakat atau negara. Menurut Wahid, pembelaan terhadap kelompok minoritas bukan perjuangan gampang. Oleh karena itu, nasib kelompok minoritas yang selama ini tersisih harus terus diperjuangkan sesuai dengan amanat UUD 1945.

Selain bermain di wacana pluralisme, ia juga bermain praktis dengan mendirikan berbagai wadah pluralisme, seperti The Wahid Institute, dan beberapa forum lintas agama baik dalam atau luar negeri. Catatan perjalanan

¹¹ Fuad Anwar, *op.cit*, hlm.11-13.

¹² Abdurrahman Wahid, *op.cit*, hlm xxix.

¹³ Abdurrahman Wahid, "Lain Jaman, Lain Pendekatan", gusdur.net, Diambil pada 17 Mei 2008.

karier Gus Dur yang patut dituangkan dalam pembahasan ini adalah menjadi ketua Forum Demokrasi untuk masa bakti 1991-1999, dengan sejumlah anggota yang terdiri dari berbagai kalangan, khususnya kalangan nasionalis dan non muslim. Ia yakin humanitarianisme mampu menjadikan seseorang tidak takut terhadap pluralitas masyarakat. Akan tetapi suami Sinta Nuriyah ini menolak masuk dalam organisasi ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) karena ia anggap sebagai organisasi sektarian. Konsen dan keberpihakan dalam pluralisme dan persamaan hak beragama ini sering mendapat tantangan dan kecaman dari berbagai pihak. Terutama yang dilontarkan para fundamentalis seperti Front Pembela Islam (FPI) dengan menuduhnya sebagai agen dari zionis atau kyai yang buta mata dan juga buta hati.

Memaknai ajaran agama, di mata KH Abdurrahman Wahid tidak dapat dilepaskan dari sisi kemanusiaannya. Untuk menjadi penganut agama yang baik, selain meyakini kebenaran ajaran agamanya, juga harus menghargai kemanusiaan. Oleh karena itu, ia selalu menilai permasalahan yang ada dengan pandangan humanis termasuk terhadap orang-orang yang tidak sependapat atau memusuhinya. Nilai-nilai kemanusiaan selalu menjadi acuan Abdurrahman Wahid dalam berpendapat dan bertindak. Ia memiliki keyakinan bahwa agama apapun selalu meletakkan nilai tersebut sebagai syarat membangun hubungan dialogis yang kondusif dalam pluralitas.¹⁴ Menurutny, selama umat beragama meyakini kebenaran ajaran agamanya dan mereka berpaham perikemanusiaan, maka selama itu pula semua akan berjalan tanpa masalah apapun.

D. Pendapat Gus Dur tentang Nasionalisme Indonesia

Gus Dur juga membenarkan adanya gejala penurunan semangat nasionalisme, terutama yang terjadi pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurutny, hal ini karena belum jelasnya penafsiran ideologi yang dimiliki negara. Ketidakpusan ini kemudian memicu masyarakat untuk

¹⁴ Listiyono santoso, *Teologi Politik Gus Dur*, (Yogyakarta: Ar Ruzz, 2004), hlm 102.

mencari ideologi alternatif selain nasionalisme. Dalam lingkup Indonesia, ia menilai nasionalisme dalam ideologi Pancasila yang dimiliki Indonesia saat ini belum cukup kuat menopang jalannya negara. Banyak penafsiran yang tidak memuaskan semua pihak mengakibatkan banyak masalah seperti pencarian ideologi baru, termasuk di dalamnya ide untuk menggantikan Pancasila dengan Agama Islam. Keadaan ini berbeda pada negara maju, karena mereka memiliki ideologi yang sudah mantap.

Hal ini sesuai dengan pendapat Abdurrahman Wahid bahwa ada kesenjangan yang besar antara ideologi negara dan keyakinan agama di lingkungan negara berkembang. Hal ini karena masih belum mantapnya kedudukan ideologi negara itu sendiri. Penafsiran yang kurang memuaskan semua pihak yang dilakukan justru mengandung potensi tajam di kelak kemudian hari.¹⁵

Ayahanda Zannuba Arifah Chofsoh ini lebih lanjut menjelaskan, nasionalisme lama perlahan memudar dan digantikan benturan antar kelompok dan golongan. Fenomena ini memang menggejala di negara-negara berkembang termasuk India yang dikenal memiliki tradisi nasionalisme yang kuat.¹⁶ Kesadaran itu yang kemudian memunculkan ide untuk kembali menggunakan ideologi sebagai penggerak pembangunan bangsa. Proses kembali pada ideologi atau reideologisasi ini mengambil dua pola perkembangan yang utama. Di satu pihak langkanya ikatan ideologi dan kuatnya kaitan kepada rekayasa teknokratik membawa pada munculnya ideologi alternatif seperti nasionalisme masa lalu, agama atau ikatan komunalistik. Dalam hal ini agama merupakan sumber inspirasi. Di lain pihak proses reideologi muncul dalam bentuk sangat kultural dengan mencoba menyusun serangkaian nilai menjadi ideologi yang lengkap dan utuh.¹⁷

Akan tetapi Abdurrahman Wahid sangat tidak setuju menjadikan agama sebagai ideologi alternatif bangsa Indonesia. Dalam hal ini ia sepakat pendapat Maududi bahwa Islam tidak memiliki konsep jelas tentang

¹⁵ Abdurrahman Wahid, *op.cit*, hlm. 183.

¹⁶ *Ibid.* hlm.188

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 192-193

nasionalisme sehingga tidak ada pula konsep negara Islam. Keadaan ini justru menguntungkan Islam, karena ia bisa diterima dimana saja. Menurut Gus Dur ada dua orientasi keagamaan dalam Islam, yaitu Islam formal dan tidak formal.¹⁸

1. Islam formal. Dalam ajaran formal ini, Islam menuntut untuk dijadikan sebagai aturan negara atau undang-undang. Sehingga cita-cita politiknya adalah membangun negara yang berasaskan hukum-hukum Islam atau Khilafah Islamiyah.

Gerakan formalisasi agama ini memiliki tiga ekspresi. *Pertama*, berdirinya banyak partai Islam berazas Islam, sebagai pengganti Pancasila. *Kedua*, tuntutan penerapan syari'at Islam, seperti Nanggroe Aceh Darussalam dan Sulawesi Selatan. *Ketiga*, munculnya kelompok muslim yang dianggap "garis keras". Laskar Jihad, Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Jama'ah Islamiyyah adalah contohnya.¹⁹

2. Islam Substantif. Ini merupakan Islam yang tidak formal. Para penganutnya menganggap Islam sebagai sebuah agama dengan nilai-nilai universal yang justru akan kehilangan universalitasnya ketika diformalisasi.

Sebagaimana Gus Dur golongan ini menilai universalisme Islam harus dinampakkan dalam tiga pilar ajarannya, yaitu hukum agama (fikih), keimanan (tauhid) dan etika (akhlaq). Akan tetapi akhlaq sering kali disempitkan pemaknaannya sebagai kesusilaan dan sikap hidup. Padahal unsur itulah yang menampilkan kepedulian yang sangat besar kepada unsur-unsur kemanusiaan (insaniah).²⁰

Selain menolak formalisasi agama dalam kehidupan negara ia juga mempunyai keyakinan bahwa negara Indonesia dengan dasar Pancasila

¹⁸ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), cet II, hlm. 74

¹⁹ Abdurrahman Wahid, "Gus Dur Ketemu Huntington", <http://islamlib.com/id/index.php?id=465&page=article>, diambil pada 17 Mei 2008.

²⁰ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan*, op.cit hlm. 3.

harus tetap dipertahankan. Gus Dur dengan tegas menolak formalisme agama di Indonesia.

Formalisme agama membutuhkan adanya relasi yang saling menguatkan antara ajaran agama dan struktur agama. Hal ini karena hukum agama dalam sebuah negara Islam adalah keputusan-keputusan hukum yang diwujudkan secara formal dan kaku, hingga dengan sendirinya menolak pluralitas. Kalau hal ini tetap dibiarkan, akan terjadi pertentangan-pertentangan dahsyat antar umat Islam.²¹ Tesis ini juga berlaku di Indonesia, meski mayoritas penduduk beragama Islam. Penolakan tidak hanya akan dilakukan oleh kalangan non muslim akan tetapi juga akan terjadi kebingungan dan pertentangan dalam memilih Islam menurut pandangan siapa? Konflik yang terjadi akibat ulah FPI dalam insiden Senayan 1 Juni 2008 lalu adalah salah satu contohnya. Insiden tersebut merupakan bentuk arogansi sekelompok orang yang mengklaim pendapatnya paling benar dan menganggap yang lain salah hingga perlu diluruskan, kalau perlu dengan menggunakan tindakan yang represif dan kekerasan.

Adapaun gerakan masyarakat yang mengandung konotasi konflik faktual dengan pemerintah menurut Gus Dur adalah karena dorongan keagamaan yang cenderung bercita-cita membentuk kerajaan Tuhan di muka bumi.²² Perihal agama sebagai pemicu konflik dibenarkan pula oleh Azyumardi Azra. Hal ini karena sifat agama yang primordial dalam diri manusia. Dengan kata lain manusia cenderung dikuasai oleh emosi agama.²³ Akan tetapi ia berpesan dalam melihat konflik dalam masyarakat yang mungkin berbeda agama ia menyarankan agar lebih jeli dalam melihat faktor penyulutnya, karena belum tentu bermotif agama.

Adapun mengenai disintegrasi, Azra berpendapat lebih karena disebabkan faktor negara. Negara dalam hal ini terlalu dominan yang disimbolisasikan pemerintahan pusat. Hal ini dinilai karena selama ini konsep

²¹ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, op.cit, hlm. 76.

²² Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan*, op.cit, hlm. 239.

²³ Azyumardi Azra, *Op.cit*, (Jakarta: Mizan,2000), hlm. 302.

Bhinneka Tunggal Ika atau *unity in diversity* tidak terjadi dan digantikan *uniformity* atau keseragaman.²⁴

Dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi nasionalisme Indonesia pada tahap yang sangat mengawatirkan. Adapun salah satu penyebabnya adalah pandangan agama dan sifat sektarian. Akan tetapi jika dipandang dari lain sudut, agama akan mampu mengembalikan nasionalisme sebagai penggerak utama bangsa. Hal ini karena agama seperti pisau bermata dua. Ia bisa menjadi masalah sekaligus solusi kebangsaan kita. Dalam kebangsaan Indonesia yang plural sangat rentan konflik, akan tetapi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai universal yang ada pada setiap agama maka perbedaan yang ada akan menjadi mozaik Bangsa Indonesia yang utuh. Dan Islam sebagai agama mayoritas alangkah manisnya ketika mau menjadi pionir kebersamaan dengan menanggalkan egoisme dan atau chauvimisme.

E. Pendapat Gus Dur Tentang Relasi Agama dan Penguatan Nasionalisme

Sebagai seorang penganut Islam substantif ia berpendapat bahwa agama, nasionalisme dan demokratisasi sangat erat berhubungan. Sebagai salah satu contoh adalah yang terjadi di Indonesia. Para pemimpin agama silih berganti memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari penjajahan dan kemudian memperjuangkan demokrasi.²⁵ Berbagai kegiatan dikembangkan kalangan agama dari tingkat paling bawah untuk merintis penumbuhan masyarakat yang demokratis. Dari mulai masalah kebebasan berpendapat, persamaan hak hingga masalah penjagaan lingkungan hidup. Akan tetapi upaya-upaya itu tidak selalu berjalan mulus.

Banyak masalah yang harus dihadapi terutama pertentangan dengan kelompok masyarakat atau agama lain karena perbedaan hakekat nilai dasar yang dianutnya. Sebuah agama senantiasa bertolak pada satu kebenaran, yaitu kebebasan ajarannya sendiri. Sedangkan demokrasi sebaliknya, ia membuka peluang sebesar-besarnya bagi perubahan nilai masyarakat. Dengan begitu

²⁴ *Ibid*, hlm. 106.

²⁵ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan*, *op.cit*, hlm. 282.

secara kasat mata demokrasi dapat mengancam nilai-nilai abadi yang terkandung dalam agama. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan sebaliknya, agama mampu menjadi penggerak pembangunan demokrasi jika agama secara internal mau berbenah. Dengan begitu telah jelas bahwa fungsi transformatif yang dibawa agama bagi demokratisasi kehidupan masyarakat, harus bermula dari transformasi intern agama itu sendiri.²⁶

Kesadaran berbangsa sebagai penggerak utama (*prime mover*) bagi cita-cita kehidupan kita sebagai bangsa, adalah sesuatu yang harus diterima sebagai fakta obyektif yang tuntas.²⁷ Ajaran Islam –sebagai komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan bermasyarakat warga negara kita– seharusnya diperankan sebagai faktor komplementer bagi komponen-komponen lain, bukannya faktor tandingan yang bersifat disintegratif terhadap kehidupan bangsa secara keseluruhan. Sehingga pada akhirnya tujuan perjuangannya adalah memfungsikan Islam sebagai kekuatan integratif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari masyarakat kita.²⁸ Dengan kata lain Abdurrahman Wahid sangat menolak penerapan agama Islam dalam bernegara, karena hal ini justru akan menimbulkan berbagai masalah seperti konflik di masyarakat, dan pada tahap panjang akan berdampak negatif pada Islam, yaitu menaruhkan Islam pada kejumudan atau anti perubahan zaman.

Dalam proses perubahan sosial, agama hanya berfungsi suplementer dan hanya menyediakan sarana bagi perubahan itu sendiri. Agama hanya mempengaruhi sejauhmana dunia mau dipengaruhi. Begitu agama mengubah dirinya menjadi penentu, maka dia telah menjadi duniawi. Kalau hal ini terjadi, pada gilirannya bisa mengundang sikap represif. Agama menjadi represif, untuk mempertahankan dirinya.²⁹ Agama tidak mengandung nilai-nilai dalam dirinya. Akan tetapi mengandung ajaran-ajaran yang menanamkan nilai sosial yang bila nilai-nilai itu meresap pada sebagian besar masyarakat, ajaran-ajaran itu akan menjadi salah satu elemen pembentuk *cultural value*

²⁶ *Ibid*, hlm. 285-287.

²⁷ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan*, *op.cit*, hlm. 235.

²⁸ *Ibid*, hlm. 236- 238.

²⁹ *Ibid*, hlm. 66.

system atau *value orientation*.³⁰ Dengan kata lain agama hanya mampu menjadi motivator dan inspirator dalam negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah realitas sejarah, oleh karena itu harus tetap dipertahankan. Mempertahankannya sama juga dengan menghargai jasa para pejuang kemerdekaan, para pahlawan yang mayoritas orang Islam

Bukti menunjukkan semakin besar hambatan dalam proses pembangunan yang diakibatkan kesalahpahaman yang sangat besar antara pihak penanggungjawab ideologi negara dan pimpinan gerakan-gerakan keagamaan di negara berkembang. Sehingga kehidupan politik di negara itu sangat labil karena negara banyak menghabiskan tenaga untuk membatasi meluasnya gerakan yang dianggap musuh potensial bagi ideologi negara tersebut.³¹

Hukum Islam diakui memiliki kedudukan yang sangat memusat. Ia tidak hanya menentukan pandangan hidup dan tingkah laku para pemeluknya juga menjadi penentu utama bagi pandangan hidup yang dimaksud.³² Hal ini bisa dilihat dari banyaknya aspek-aspek kehidupan yang disaring, ditolak dan dihancurkan oleh hukum Islam seperti sistem perbudakan dan diskriminasi rasial.

Akan tetapi, kedudukan yang demikian penting itu, kini mengalami proses yang disebut Gus Dur sebagai irrelevansi. Hukum perdata, pidana, ketatanegaraan dan internasionalnya sudah berangsur-angsur digantikan oleh hukum modern. Kalaupun ada yang tersisa dan masih mendapat tempatnya adalah soal ibadah, itupun dalam kadar dan intensitas yang semakin berkurang dan lebih bersifat perorangan. Hukum Islam dalam kehidupan bangsa Indonesia masih bersifat statis dengan membentuk “pos pertahanan” untuk mempertahankan identitas keislaman dari pengaruh non Islam, terutama yang bersifat sekuler.

Menurut Presiden RI keempat ini, watak statis itulah yang menjadikan hukum Islam berperan negatif dalam kehidupan hukum di negeri ini. Hukum

³⁰ *Ibid*, hlm. 72

³¹ *Ibid*, hlm. 165

³² *Ibid*, hlm. 46.

Islam baru bisa berkarya menolak kemungkaran, kebatilan dan kemaksiatan, akan tetapi belum mampu menjadi penyeru kebaikan dalam arti luas dengan corak pemikiran yang apologetis, hanya mampu mencanangkan konsep ideal.³³ Oleh karena itu tidak heran bila hukum Islam telah kehilangan relevansinya dengan perkembangan kehidupan di sekitarnya.

Meski dalam praktiknya hukum Islam tidak lagi berperan secara penuh dan menyeluruh, ia masih memiliki arti besar pada pemeluknya. *Pertama*, turut menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan mereka, minimal dengan penetapan baik-buruk, perintah, anjuran, perkenan dan larangan. *Kedua*, banyak keputusan hukum yang diserap dari hukum Islam dan menjadi hukum positif yang berlaku. *Ketiga*, masih adanya golongan-golongan yang memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dengan slogan penerapan hukum Islam secara penuh. Dengan demikian ia menjadi bagian dari manifestasi kenegaraan Islam yang masih harus ditegakkan di masa depan.³⁴

Oleh karena itu, untuk mengembalikan relevansinya tersebut, hukum Islam harus mengembangkan watak dinamis bagi dirinya di antaranya dengan menjadikan dirinya penunjang perkembangan hukum nasional. Adapun sifat dinamis ini hanya bisa didapat jika hukum Islam meletakkan titik berat perhatiannya kepada soal-soal duniawi yang menggeluti kehidupan bangsa dewasa ini, dan memberikan pemecahan bagi persoalan-persoalan hidup aktual yang dihadapi masa kini. Dengan kata lain, ia harus memiliki pendekatan multi-dimensional kepada kehidupan, dan tidak hanya terikat kepada ketentuan normatif yang telah mengendap sekian lama.³⁵

Menurut Abdurrahman Wahid perlu adanya konsep “Pribumisasi Islam”. Pribumisasi Islam merupakan suatu pemahaman Islam yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama tanpa mengubah hukum itu sendiri. Adapun yang dipribumikan adalah manifestasi kehidupan belaka, bukan ajaran yang

³³ *Ibid*, hlm. 49.

³⁴ *Ibid*, hlm. 48.

³⁵ *Ibid*, hlm. 50.

menyangkut inti keimanan dan ibadah formalnya.³⁶ Dengan begitu agama menjadi landasan keimanan masyarakat, mampu menjadi inspirator dan motivator dalam setiap tingkah laku masyarakat yang beretika, termasuk dalam kaitannya sebagai warga bangsa Indonesia.

F. Arti Penting Pendidikan Agama Islam dalam Penguatan Nasionalisme Menurut Gus Dur

Latar belakang pendidikan, sosial, dan organisasi keagamaan tentusaja sangat jelas mempengaruhi heterogenitas kandungan pemikiran gerakan pembarua Islam. Sebagai seorang intelektual muslim yang juga pernah menjadi seorang dosen sekaligus tokoh nasionalis Abdurrahman Wahid juga memiliki konsep tentang pendidikan dan perbaikan bangsa. Akan tetapi konsep pendidikan yang dimiliki sangat global sehingga membutuhkan interpretasi ulang supaya bisa dijalankan.

Ia berpendapat dua raksasa di lingkungan gerakan-gerakan Islam, yaitu Muhammadiyah dan NU, memimpin kesadaran berbangsa melalui jaringan pendidikan yang mereka buat. Keduanya sangat dipengaruhi oleh apa yang berkembang di lingkungan gerakan nasionalis. Nasionalisme dalam arti menolak penjajahan, berarti juga pencarian jati diri sejarah masa lampau negeri sendiri.³⁷ Sehingga tidak heran ketika saat itu orang yang paham konsep nasionalisme adalah para generasi muda yang terdidik.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa hukum atau ajaran Islam memiliki arti besar pada pemeluknya, meski tidak secara penuh. Islam merupakan penuntun dan sumber nilai bagi para muslim. Adapun proses transformasi ajaran Islam itu bisa dilakukan melalui berbagai jenis pendidikan. Dengan begitu Pendidikan agama Islam memiliki tugas yang berat. Akan tetapi selama ini pendidikan di Indonesia dinilai gagal dalam mengemban tugasnya. Begitu juga yang terjadi pada pendidikan agama yang seharusnya

³⁶ Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2007) hlm. 61.

³⁷ Abdurrahman Wahid, "NU, Nasionalisme, dan Politik", *op.cit*

mengambil peran sentral dalam membangun karakter masyarakat dalam kehidupan nyata.

Menurut Muhaimin kegagalan tersebut setidaknya disebabkan oleh dua aspek. Pertama pendidikan agama telah kehilangan ruh moralnya karena masih berpusat dengan persoalan yang bersifat simbolik, ritualistik dan legal formal. Kedua, kegiatan pendidikan agama yang tidak mampu menyentuh ranah psikomotorik sehingga apa yang telah diajarkan kepada peserta didik tidak mampu diwujudkan dalam tingkah nyata dalam kehidupan.³⁸

Di lain pihak Qodri Azizy menilai nilai-nilai ideal agama Islam yang tidak terwujud di kehidupan sehari-hari dalam sistem sosial adalah bukti adanya krisis multi dimensi atau krisis lingkaran setan, dan untuk memperbaikinya harus dengan kembali kepada ajaran agama.³⁹ Perbaikan ini harus dimulai dari para pemimpin bangsa dan elit politik dalam beretika sosial, sedangkan untuk jangka ke depan bangsa ini harus diperbaiki melalui pendidikan, termasuk pendidikan agama.

Pelajaran agama dan praktek etika sosial harus mendapat perhatian serius di setiap sekolah/madrasah, sejak dari kebijakan dan kurikulum, sampai dengan praktek dan evaluasinya agar pendidikan agama mencapai tujuan sejatinya, yaitu terbangunnya kehidupan masyarakat yang bermoral secara ideal dan prakteknya atau dengan kata lain terwujudnya realitas masyarakat dengan perilaku moralitas.⁴⁰

Sedangkan Dedi Supriadi menyatakan, penjabaran tujuan pendidikan yang salah satunya adalah dalam pencapaian iman dan taqwa (imtaq) mengalami kesulitan. Ia menilai dalam praktiknya pendidikan lebih mengutamakan dimensi tujuan yang bersifat instrumental yang berkenaan dengan aspek pengetahuan dan keterampilan. Hal ini karena sistem persekolahan lebih banyak mengejar pembelajaran akademik bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Alasan lain adalah karena

³⁸ Muhaimin, *op.cit*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2003), hlm. 71.

³⁹ Qodri Azizy, *Pendidikan Agama Untuk Membangun Etika Sosial*, *op.cit*, hlm. 82-85.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 85.

pengembangan kedua pelajaran tersebut lebih mudah diamati dan diukur perkembangannya.⁴¹

Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa pendidikan Agama Islam mengalami berbagai kendala dalam mencapai tujuan. Salah satu bukti kegagalannya adalah ketidakmampuannya dalam menanamkan ajaran-ajaran agama kepada masyarakat untuk bisa dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh meski Agama Islam sangat mencintai perdamaian akan tetapi banyak penganutnya yang justru melakukan tindakan teror, agama menghendaki keadilan sosial akan tetapi masyarakat enggan membayar zakat dan pajak, atau banyaknya kasus korupsi dan politik yang kotor di Indonesia.

Tantangan pendidikan agama Islam saat ini adalah bagaimana pendidikan tersebut tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama, akan tetapi dapat mengarahkan peserta didik memiliki kualitas keberagamaan yang kuat sehingga pendidikan agama mampu membentuk sikap dan kepribadian masyarakat yang memiliki iman dan taqwa yang sesungguhnya, dan juga dipraktekkan dalam dunia realitas secara kontekstual.

Adapun kendala yang dihadapi oleh pendidikan Agama Islam adalah pengajarannya yang tidak menyentuh aspek efektif dan psikomotor. Hal ini karena pengajarannya yang tidak lebih dari sekedar formalitas, ritualitas dan sekedar pengetahuan. Padahal pada intinya pendidikan agama lebih jauh dari itu, yaitu berkenaan dengan pembangunan moral dan menyentuh ranah afektif dan psikomotorik.

Seharusnya para guru mengacu pada peraturan yang telah dibuat pemerintah mengenai penilaian hasil belajar agama yaitu melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.⁴²

Pendidikan Islam tidak hanya diajarkan dalam ajaran-ajaran formal di sekolah, akan tetapi lebih banyak komunikasi dari luar sekolah. Harus diakui

⁴¹ Dedi Supriadi, *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 122.

⁴² PP Nomor 19 tahun 2005.

pendidikan memiliki begitu banyak model pengajaran, baik yang berupa pendidikan sekolah atau non formal seperti perkumpulan arisan dan pengajian. Kenyataan ini harus diakui dan mendapat perhatian, karena jika tidak maka pendidikan Islam dirasa pincang. Karena itu, ketika berbicara mengenai perbaikan pendidikan Agama Islam, maka yang dipikirkan adalah keseluruhan aspek yang juga tercakup di dalamnya pendidikan formal, non formal dan informal.

Menghadapi dunia yang semakin modern, pendidikan Islam harus mampu menyesuaikan diri. Dua hal yang saling terkait dalam pendidikan Islam saat ini adalah pembaharuan (*tajdid*) dan modernisasi (*al-hadasah*).⁴³ Dalam pembaharuan pendidikan Islam ajaran-ajaran formal harus lebih diutamakan, dan kaum muslimin harus dididik dengan ajaran-ajaran agama mereka. Adapun yang diubah adalah cara-cara penyampaian sehingga ia akan mampu memahami dan mempertahankan kebenaran. Adapun modernisasi pendidikan Islam menuntut umat Islam untuk menjawab tantangan modernisasi. Tantangan seperti pengentasan kemiskinan, lingkungan hidup dan kebangsaan.

Adapun pembaharuan ini meliputi pengajaran teks-teks keagamaan yang perlu ditafsir ulang. Sedangkan teks-teks yang telah ditafsir ulang tersebut digunakan sebagai konsep untuk menjadi solusi konkrit dalam menghadapi masalah-masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Tanpa kehadirannya Islam akan mengalami "kemacetan" yang justru menyalahi ketentuan agama sebagai agama yang akan selalu sesuai kapanpun dan dimanapun.⁴⁴

Islam memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keadaan dan masalah yang dihadapi sebuah bangsa atau negara. Dalam negara Indonesia yang plural ini, KH Ahmad Siddiq mengajukan konsep persaudaraan yang terdiri dari empat hal. *Pertama*, persaudaraan sesama manusia (*ukhuwah Basyariyah*), yaitu cara bergaul sesama umat manusia tanpa ada faktor pembeda, *kedua*,

⁴³ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, op.cit hlm. 225.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 170

persaudaraan sesama umat beragama (*ukhuwah diniyah*), sebagai landasan sikap saling menghormati sesama umat beragama, *ketiga*, persaudaraan sesama umat Islam (*ukhuwah islamiyah*), prinsip persaudaraan internal tanpa melihat organisasinya dan *keempat*, persaudaraan sesama warga negara (*ukhuwah wathoniyah*), prinsip persaudaraan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dan mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman apapun.⁴⁵

Empat prinsip inilah yang seharusnya ditanamkan dalam pribadi masyarakat Indonesia. Umat Islam tidak boleh melupakan sebuah kenyataan penting berupa rumusan ajaran Islam yang sebenarnya, sebagaimana yang ada pada ayat Al Quran bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan segala perbedaannya untuk saling mengenal dan sikap dasar dari ketentuan Tuhan tetap berpegang kepada tali Allah secara keseluruhan, dan jangan terpecah-belah.

Sikap dasar ini juga merupakan antisipasi terhadap kenyataan akan masa depan agama Islam dan kaum muslimin, seperti telah terbukti dewasa ini yaitu Islam merupakan agama besar, tanpa mengecilkan agama-agama lain. Inilah yang belum disadari oleh sebagian muslim sehingga mereka memilih jalur yang kaku dan berhalauan keras. Sikap-sikap keras yang kita lihat masih ada di kalangan kaum muslimin mudah-mudahan akan hilang melalui pendidikan yang lebih baik dan komunikasi yang lebih *intens*.⁴⁶

Proses sosialisasi hasil internalisasi yang telah didinamisir, dapat dikembangkan pula dengan mendayagunakan forum-forum keagamaan (seperti pengajian, musyawarah hukum agama, pendidikan agama dan sebagainya) begi keperluan membicarakan hal-hal yang perlu diinternalisasikan secara dinamis, seperti dalam hal penggunaan semua forum di atas untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya orientasi baru bagi pembangunan, dan seterusnya.⁴⁷

⁴⁵ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kyai*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm. 176.

⁴⁶ Abdurrahman Wahid, "Lain Jaman, Lain Pendekatan", *op.cit.*

⁴⁷ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan*, *op.cit.*, hlm. 43.

BAB IV
KONSEP PENGUATAN NASIONALISME
MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MENURUT PEMIKIRAN
ABDURRAHMAN WAHID

Dalam melakukan analisis dari data-data yang telah diperoleh untuk skripsi ini, peneliti mencoba menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data tersebut adalah *data reduction* (merangkup data yang telah terkumpul dan memilih hal-hal yang pokok kemudian mencari tema dan polanya), *data display* (dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dsb), dan *conclusion drawing/verivication* (kesimpulan akhir).¹

Karena dalam penelitian ini bersifat literer dengan menggunakan riset pustaka yaitu meneliti buku-buku dan dokumen-dokumen yang terkait, maka sudah barang tentu dalam menganalisisnya menggunakan metode interpretasi, dimana metode ini adalah suatu bentuk cara yang dilakukan dengan menyelami isi buku untuk diungkap arti serta nuansa yang disajikan.² Selain itu, dalam metode pembahasannya akan digunakan metode induktif³ dan deduktif⁴.

A. Agama Menjadi Motivator dan Inspirator Bangsa Indonesia

Sebagaimana telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya bahwa saat ini ideologi-ideologi besar seperti kapitalisme, komunisme dan nasionalisme dinilai tidak mampu memberikan jawaban pasti mengenai persoalan-persoalan fundamental manusia terutama dalam menghadapi masalah-masalah lingkungan hidup, dan masalah negara. Akibatnya orang kembali tertarik pada komunitas sosial antropologis yang lebih sempit seperti kekerabatan,

¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 92-99.

² Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 106.

³ Metode induktif adalah metode pembahasan dengan menggunakan pola pikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, kepada penilaian yang sifatnya khusus. Atau pengambilan satu kesimpulan dengan melihat sesuatu yang bersifat umum dulu untuk kemudian baru ditarik satu kesimpulan secara khusus.

⁴ Metode deduktif merupakan kebalikan dari metode induktif dimana metode pembahasannya yang menggunakan pola pikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus untuk kemudian dijabarkan atau digeneralisasikan kepada hal-hal yang bersifat umum.

kedaerahan, agama dan kelas sosial. Keadaan ini memang telah terjadi di Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa kelompok masyarakat yang menginginkan wilayahnya terpisah secara politis dari negara Indonesia dengan berbagai alasan seperti agama atau lokalitas dan kesukuan. Kembalinya masyarakat ke komunitas yang lebih kecil tersebut merupakan salah satu bukti menurunnya semangat nasionalisme pada rakyat Indonesia. Bila keadaan ini tetap dibiarkan akan menjurus pada konflik komunal dan konflik kebangsaan yang berbahaya bagi stabilitas dan integrasi Bangsa Indonesia.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas ikatan kebangsaan dan penyebab munculnya konflik antar kelompok setidaknya bisa dikategorikan dalam dua bagian besar, internal dan eksternal. Penyebab internal dapat dikategorikan dalam dua bagian, yaitu:

1. Faktor yang bersifat subjektif-emosional, yakni: ideologi, agama, etnisitas dan sejarah. Perbedaan-perbedaan ideologi, agama, ras, dan sejarah yang menjadi identitas masyarakat Indonesia mengakibatkan perasaan chauvinisme terhadap kelompoknya masing-masing dan saling curiga dengan kelompok lain. Seperti orang Jawa yang merasa lebih unggul daripada etnis lain karena paling banyak menguasai simpul politik dan ekonomi, sedangkan etnis Batak merasa bahwa orang Jawa yang sering berada di puncak pimpinan tersebut telah melakukan eksploitasi pada wilayahnya akan tetapi tidak memberi kesempatan kepada penduduk setempat untuk mengambil manfaat dari wilayahnya sendiri. Dalam dunia kerja juga sering terdengar keluhan bahwa orang pribumi akan sulit mendapatkan jabatan bagus dalam perusahaan etnis China. Contoh lain adalah kepercayaan orang Aceh bahwa wilayahnya tidak pernah dijajah bangsa manapun dan masuk dalam kedaulatan Indonesia secara sukarela. Pendapat ini menjadikan masyarakat Aceh merasa berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terbukti efektif menggunakan keyakinan tersebut untuk mengajak masyarakat Aceh melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

Perasaan chauvinisme berlebihan ini secara otomatis membuat seseorang tertutup dan melakukan aksi protektif terhadap komunitas lain, sehingga menimbulkan perasaan curiga dan kecemburuan sosial. Keadaan ini tentunya tidak sehat untuk pembangunan negara yang membutuhkan keterbukaan, rasa saling percaya, kerjasama dan solidaritas yang tinggi.

2. Faktor yang bersifat objektif-rasional-instrumental, yakni: ekonomi, politik, hukum dan militer. Sebagai contoh adalah keadaan ekonomi masyarakat yang tidak mapan ditambah lagi dengan kesenjangan ekonomi antar wilayah yang terlihat sangat mencolok, kebijakan politik dari atas ke bawah yang merugikan dan tidak mendengar aspirasi masyarakat akar rumput, tidak adanya supremasi hukum sehingga hukum hanya akan berpihak pada orang kaya. Keadaan yang tidak menentu tersebut menjadikan masyarakat apatis terhadap negara dan pada akhirnya kehilangan rasa cinta terhadap tanah airnya sendiri.

Kalau orang-orang terdahulu memiliki prinsip 'hujan batu di negeri sendiri jauh lebih baik daripada hujan emas di negeri orang', yang artinya orang lebih memilih untuk mencari nafkah di negaranya sendiri meski kondisi negara sedang sulit, sedangkan generasi sekarang lebih memilih mencari uang yang banyak dengan cara apapun termasuk menjual aset dan hargadiri bangsa sendiri. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mampu lagi berpikir mengenai cara membangun bangsa, karena mereka sendiri disibukkan dengan permasalahan ekonomi yang tak berkesudahan. Dalam hal ini kiranya benar pendapat Maslow bahwa kebutuhan paling dasar manusia adalah yang bersifat fisik, berupa makan dan minum, jika kebutuhan ini belum terpenuhi manusia tidak akan berpikir pada kebutuhan yang lebih tinggi seperti aktualisasi diri dalam membangun sebuah bangsa.

Selain faktor internal di atas, ada pula faktor eksternal. Yaitu, permasalahan-permasalahan yang terjadi secara global, seperti berakhirnya perang dingin, kemajuan teknologi dan laju globalisasi. Berakhirnya perang

dingin berdampak merugikan terhadap negara berkembang, yang selalu dijadikan obyek dan ladang ekspansi negara-negara maju.

Di tangan teknologi seolah dunia tanpa ada batasan lagi dan semakin menyempit, ditambah laju globalisasi pada satu pihak menjadikan seseorang berpikir dengan pola global, bukan lagi kedaerahan atau berdasar lokalitas. Sedangkan di pihak lain, orang menjadi sangat jenuh dan muak dengan tawaran globalisasi yang bersifat mekanis dan kering dari nilai. Pada pihak pertama, orang tidak lagi mempedulikan akan kebangsaannya sedangkan pihak kedua berusaha mencari jawaban dengan penentangan yang hebat dan anti globalisasi sebagaimana yang dilakukan para fundamentalis. Meski mengambil pola yang berbeda, dua pihak tersebut sama-sama mengancam stabilitas bangsa.

Uraian di atas merupakan bukti nyata semakin meluruhnya garis-garis batas negara. Akan tetapi hal ini justru menunjukkan relevansi pentingnya nasionalisme sebagai pembentuk pandangan yang sehat dan wajar dalam jangka panjang. Ia merupakan isi dari kerangka penanganan masalah secara mendasar. Nasionalisme akan menyadarkan warga tentang arti pentingnya hidup bersama atas persamaan status dan hak. Selain itu, dengan nasionalisme akan mampu mendorong penggunaan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan bersama. Dengan nasionalisme pula yang akan mampu mendudukkan suatu bangsa sejajar dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia tidak akan bisa hidup dalam dunia internasional dengan berjalan sendiri-sendiri. Hanya dengan nasionalisme Bangsa Indonesia bisa memasuki tahap internasionalisme. Jadi, dengan modal nasionalisme itulah rakyat Indonesia bisa bersama-sama membawa identitas bangsa dan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara lain di dunia.

Kesimpulannya, penumbuhan kesadaran dan semangat nasionalisme ternyata menyentuh hakekat inti dari kehidupan umat manusia yaitu menyangkut kepentingan yang berbeda secara rasional. Kesadaran itu akan dapat tumbuh apabila dapat dikembangkan sikap memahami bahwa kemampuan mempertahankan unikum suatu golongan hanya dapat

dikembangkan dalam kebersamaan dengan golongan-golongan lain. Kiranya prinsip Bhinneka Tunggal Ika memang menjadi solusi yang mujarab dan sangat sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa perbedaan yang ada merupakan modal besar untuk saling melengkapi dan bersama-sama membangun bangsa.

Founding father kita benar-benar menyadari potensi dan ancaman bangsa ini karena keanekaragaman yang tersebar di 1400 pulau mulai pulau Sumatra sampai Papua. Ia diletakkan di bawah kaki lambang negara, tentunya dengan maksud bahwa apapun yang kita perbuat, bagaimanapun pendapat kita masing-masing akan tetapi harus selalu berpijak pada landasan dasar bahwa meski ada perbedaan dan pertentangan di antara kita, kita tetap akan bergandengan tangan dengan mesra. Tak ada niat sedikitpun untuk baku hantam sesama saudara karena perbedaan-perbedaan itu. Bahkan dalam ajaran Islam perbedaan juga sangat dihargai dengan menganggapnya sebagai *rahmah* atau anugerah Tuhan.

Menurut Gus Dur Pancasila adalah ideologi final Bangsa Indonesia. Pendapat ini juga sangat disepakati para cendekiawan muslim Indonesia yang memilih jalur Islam substantif seperti Nurcholis Madjid. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan penganut Islam formal yang menghendaki Islam sebagai landasan negara di Indonesia yang berpandangan bahwa meski Pancasila telah dianggap final akan ia sebagai ideologi terbuka sebagai landasan kehidupan sosial-politik Indonesia yang plural dan modern.

Agama memang sering dituduh menjadi faktor penyebab menurunnya semangat nasionalisme. Hal ini memang tidak mudah dibantah, karena pada kenyataannya gerakan-gerakan separatis yang terjadi di Indonesia sebagian besar menggunakan pendekatan keagamaan dalam melakukan aksinya. Dengan propaganda-propaganda yang sarat muatan agama mereka berusaha mencari dukungan, dan ternyata yang dilakukan efektif.

Konflik Sambas yang terjadi awal tahun 1999 pada mulanya bukan bermuatan SARA. Akan tetapi dengan isu penyerangan orang Kristen terhadap warga muslim, akhirnya permasalahan semakin memanas dan meluas

serta memakan banyak korban nyawa. Kejadian yang mengerikan ini bermula pada penangkapan seorang pencuri asal Madura oleh warga Parit Setia. Akhirnya warga Madura yang tinggal di sebelah desa datang dengan maksud balas dendam. Mereka datang membawa senjata tajam dan mengamuk sehingga tiga orang Parit Setia tewas. Sebenarnya kasus tersebut sudah bisa diredam oleh tokoh masyarakat dari kedua pihak, akan tetapi kejadian tersebut sudah terlanjur didengar dan menjadi pembicaraan hangat seluruh Sambas. Berita yang mengalir itu kemudian dibumbui dengan berbagai hal sehingga keadaan semakin memanas sehingga insiden-insiden kecil yang terjadi setelahnya dengan mudah menyulut amarah warga.⁵

Sebagai sistem kepercayaan dan ideologi utama manusia, agama sangat diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam berpikir lebih luas dengan menghargai perbedaan yang ada. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam konteks ini adalah untuk menghilangkan fanatisme berlebihan masyarakat terhadap agama yang dianutnya –yang terutama disebabkan oleh “ketidaksadaran”. Karena agama justru akan menjadi sumber konflik ketika ia dipandang oleh penganutnya sebagai kebenaran mutlak yang harus disebarluaskan kepada umat lain di luar kelompoknya. Bahkan tidak jarang dengan cara pemaksaan dan kekerasan.

Dalam hal ini peneliti dengan mantap berpendapat bahwa siapapun tidak berhak memaksakan kehendaknya dengan cara anarki. Begitu pula atas nama agama. Agama Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk Indonesia menurut pendapat Abdurrahman Wahid dan pemikir Islam yang memiliki paradigma simbiotik dalam memandang relasi agama dan negara, tidak menolak nasionalisme dan juga tidak menuntut pendirian negara yang berbasis agama Islam. Pemikiran politik aliran ini umumnya cenderung ke arah Islam substansial dan menitik beratkan ajaran Islam yang universal. Mereka menganggap dengan ideologisasi Islam berarti telah mereduksi Islam dan menempatkannya pada wilayah yang terlalu sempit. Islam seharusnya

⁵ Edi Patebang dan Eri Sutrisno, *Konflik Etnis di Sambas*, (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2000), hlm 3-4.

ditempatkan sebagai komplementer konsep nation-state dan Negara Pancasila dianggap telah final.

Sebagai penyempurna ajaran terdahulu dan rahmat bagi seluruh umat, Islam tentunya sangat fleksibel dan memahami keadaan manusia yang tidak bisa disamaratakan. Adapun ajaran-ajaran Islam harus ditegakkan sendiri oleh masyarakat, bukan ditegakkan oleh institusi negara yang cenderung memiliki sifat represif. Pendapat ini bukan tanpa bukti. Sejarah telah membuktikan bahwa negara yang dibentuk berdasarkan agama tertentu maka yang terjadi adalah penindasan terhadap umat beragama lain atas nama otoritas negara. Lebih membahayakan lagi jika otoritas pemimpin atau negara diklaim sebagai otoritas Tuhan.

Gus Dur menilai universalisme Islam harus dinampakkan dalam tiga pilar ajarannya, yaitu hukum agama (fikih), keimanan (tauhid) dan etika (akhlak). Akan tetapi ia menyayangkan saat akhlak sering kali disempitkan pemaknaannya sebagai kesusilaan dan sikap hidup. Padahal unsur itulah yang menampilkan kepedulian yang sangat besar kepada unsur-unsur kemanusiaan (insaniah). Sebagaimana pendapat salah satu dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, Muhammad Tholchah Hasan bahwa ajaran Islam selalu mengacu pada empat hal yaitu, pembentukan pribadi yang bersih, mewujudkan kemaslahatan umum, menegakkan keadilan masyarakat dan menghormati martabat kemanusiaan.

Tiga prinsip dasar dan empat tujuan tersebut merupakan kerangka yang sangat jelas bagi seseorang untuk menjalankan ajaran agamanya. Seorang muslim bebas menjalankan ekspresi keagamaannya selama sesuai dengan empat norma yang telah digariskan di atas.

Peneliti menilai empat norma Islam itu juga dimiliki oleh Negara Indonesia, sebagaimana yang terpahat dalam Pancasila. Jadi, antara agama dan Negara Indonesia sebenarnya memiliki visi yang sama, memiliki cita-cita dan tujuan yang searah, dengan begitu tidak ada alasan untuk saling menegasikan satu antara lain. Justru peneliti melihat bahwa agama telah menjadi spirit bagi negara untuk membangun. Ini merupakan formasi yang indah antara agama

dan negara. Posisi agama dalam hubungan yang seperti ini tentunya terlihat begitu anggun dan wibawa karena berada pada posisi yang paling tepat.

Memang keyakinan terhadap kebenaran agama merupakan sebuah kemutlakan. Adapun kepatuhan kepada negara merupakan wujud konkrit dari kepatuhan kepada ajaran agama. Nabi juga selalu mencontohkan untuk berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada tawanan perang dan musuh yang jelas-jelas telah menganiayanya dan memerintahkan untuk taat kepada pimpinan yang telah diangkat. Dalam hal ini Abdurrahman Wahid sependapat dengan KH Syaifuddin yang berpendapat bahwa seorang muslim harus melihat fakta historis kebangsaan ini, dan harus dapat secara cermat membaca sifat-sifat ilahiyah dari akidah yang dipahaminya agar hubungan secara vertikal dengan Tuhan sempurna.

Hal ini juga menjadi keyakinan mantap dalam pemikiran Gus Dur. Ia berpandangan bahwa jika kita dapat mengaitkan semangat kebangsaan dan keagamaan yang kita miliki dengan asas kemanusiaan dalam kehidupan kita sebagai bangsa maka tujuan berbangsa akan tercapai, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur atau yang dalam istilah Bahasa Arab lebih dikenal *baldatun thoyyibatun warobbun ghofur*.

Kolaborasi yang tangguh antara semangat kebangsaan dan keagamaan ini tentunya tidak boleh disimpan sendiri oleh kalangan-kalangan terpelajar yang berwawasan islamis-nasionalis, karena hanya akan menjadikan wacana tersebut dalam sebuah menara gading. Kabar gembira ini harus segera disebarluaskan dengan cara mendidik masyarakat di berbagai lapisan. Karena Indonesia membutuhkan kesadaran kolektif ini untuk tetap tegak dan melaksanakan pembangunan.

Di tengah kondisi Bangsa Indonesia yang plural, diharapkan pendidikan Agama Islam mampu mengajarkan para generasi muslim untuk tetap menjaga persatuan bangsa. Atau meminjam istilah Muhaimin *ukhuwah islamiah* dalam arti luas, yaitu persaudaraan antar sesama manusia untuk membentuk kesalehan pribadi dan sosial.

Dalam hal ini pendidikan telah diakui memiliki peran sentral dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dalam wilayah agama, ia diharapkan mendidik manusia menjadi insan yang sempurna dan mampu mengemban amanat sebagai khalifah di bumi. Dalam kaitannya dengan politik, ia berpengaruh pada pembentukan manusia sebagai anggota sebuah bangsa yang baik dan bertanggungjawab.

B. Hambatan yang Dihadapi dalam Penguatan Nasionalisme Indonesia Melalui Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam dalam hal ini memang memiliki tugas yang berat. Ia diharapkan mampu menghindari hal-hal berikut: 1. Menumbuhkan semangat fanatisme buta. 2. Menumbuhkan sikap intoleran di kalangan peserta didik dan masyarakat Indonesia dan. 3. Memperlemah kerukunan hidup beragama serta persatuan dan kesatuan nasional. Adapun untuk mencapai semua itu pendidikan agama masih menghadapi banyak masalah. Selama ini pendidikan di Indonesia dinilai gagal dalam mengemban tugasnya. Begitu juga yang terjadi pada pendidikan agama yang seharusnya mengambil peran sentral dalam membangun karakter masyarakat dalam kehidupan nyata.

Pendidikan Agama Islam dalam penelitian ini bisa dikategorikan dalam dua bagian. Yaitu pendidikan agama dalam sebuah institusi pendidikan sebagaimana di sekolah formal dan non formal, dan pendidikan dalam arti proses transfer pengetahuan keislaman di luar institusi seperti kelompok pengajian dan arisan dan lain sebagainya. Akan tetapi peneliti dalam hal ini melakukan generalisasi, sehingga mengambil pandangan yang lebih umum dan mencakup keseluruhan aspek. Dengan begitu pendidikan Agama Islam dalam hal ini adalah segala kegiatan yang dilakukan yang bertujuan melakukan transfer pengetahuan ajaran-ajaran Agama Islam.

Generalisasi ini memang terlihat agak rancu, akan tetapi sama sekali tidak mengurangi atau mengaburkan fokus permasalahan. Hal ini karena permasalahan terletak pada hakekat inti pendidikan. Setidaknya kegagalan pendidikan Agama Islam ini terjadi karena dua aspek:

1. Pendidikan agama telah kehilangan ruh moralnya karena masih berpusat dengan persoalan yang bersifat simbolik, ritualistik dan legal formal. Sebagaimana tadi telah dibahas dengan jelas bahwa pilar ajaran Islam ada tiga yaitu fikih atau hukum Islam, tauhid atau dasar teologis dan akhlak atau etika hidup. Ketiga hal ini dalam istilah ulama lain juga sering disebut sebagai Islam, Iman dan Ihsan. Tiga hal tersebut bukan merupakan kesatuan yang terpisah atau saling menegasikan. Sehingga, antara Islam, Iman dan Ihsan harus mendapat porsi yang berimbang, supaya tidak terjadi kepincangan.

Peneliti sama sekali tidak bermaksud merendahkan fikih dengan penyimpulan pendidikan Agama Islam terlalu *fikih oriented*. Fikih dalam ajaran Islam sangat penting, akan tetapi peneliti menilai bahwa porsi yang terlalu besar pada kajian fikih yang cenderung bersifat legal formal ini telah membuat masyarakat muslim lebih menyukai ‘kulit daripada isi’. Artinya, para muslim lebih condong menjadikan agama sebagai ritualitas dan formalitas belaka. Orang sudah merasa memeluk agama secara benar ketika telah sehari lima kali menjalankan sholat, atau bahkan karena memanjangkan jenggot dan memendekkan celana, sedangkan kesehariannya melakukan pencemaran dan eksploitasi lingkungan serta selalu menyakiti hati tetangga dengan perkataan-perkataan yang kasar.

Pendidikan yang hanya berorientasi fikih ini juga semakin mengotakkan Agama Islam dalam simbol ritualitas. Padahal seharusnya ia memiliki tugas yang lebih besar. Ia diharapkan mampu memberi solusi pada permasalahan masyarakat yang semakin kompleks dalam dunia modern saat ini.

2. Kegiatan pendidikan Agama Islam tidak mampu menyentuh ranah psikomotorik sehingga apa yang telah diajarkan kepada peserta didik tidak mampu diwujudkan dalam tingkah laku nyata dalam kehidupan.

Permasalahan ini biasanya dialami untuk pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah. Sedangkan kejadian sebaliknya dialami oleh pendidikan non formal. Hal ini karena para guru di sekolah-sekolah lebih

mengejar pada target materi dengan model evaluasi yang berupa tes tulis atau lisan. Guru memiliki perhatian yang kurang terhadap siswa, sehingga tidak mampu memantau kualitas penerapan ajaran Agama Islam secara lebih intens. Guru tidak tahu bagaimana akhlak siswa di masyarakat, di balik nilai ujian siswa yang memuaskan tersebut. Siswa hanya mampu menghafal materi, tetapi apa yang dia dapat tidak mampu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal pelajaran Agama Islam bukan hanya pengetahuan saja, tetapi berfungsi sebagai pandangan hidup yang harus dipakai dalam dunia nyata.

Pelajaran agama dan praktik etika sosial harus mendapat perhatian serius di setiap sekolah/madrasah, sejak dari kebijakan dan kurikulum, sampai dengan praktik dan evaluasinya agar pendidikan agama mencapai tujuan sejatinya, yaitu terbangunnya kehidupan masyarakat yang bermoral secara ideal dan praktiknya atau dengan kata lain terwujudnya realitas masyarakat dengan perilaku moralitas.

Pendidikan agama harus lebih ditekankan pada pembangunan karakter bangsa. Pendidikan agama selain mengasah nalar, juga hal yang lebih penting adalah mengasah rasa dan perilaku. Dalam hal ini sebenarnya Islam dengan tegas menyatakan bahwa pembangunan karakter merupakan tujuan utama Agama Islam. Akan tetapi pemahaman ini agak mengalami kebingungan saat mendarat dalam lapangan sosial, dalam ranah kehidupan. Pendidikan Agama Islam mengalami kesulitan untuk membuat formulasi yang tepat.

Dua hal inilah penyebab utama kegagalan pendidikan Islam. Kesimpulan ini merupakan penilaian umum dari para pemerhati pendidikan Islam, seperti Guru Besar UPI Bandung, almarhum Dedi Supriyadi. Dedi Supriyadi menyatakan, penjabaran tujuan pendidikan yang salah satunya adalah dalam pencapaian iman dan taqwa (imtaq) mengalami kesulitan. Ia menilai dalam praktiknya pendidikan lebih mengutamakan dimensi tujuan yang bersifat instrumental yang berkenaan dengan aspek pengetahuan dan keterampilan. Hal ini karena sistem persekolahan lebih banyak mengejar

pembelajaran akademik bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Alasan lain adalah karena pengembangan kedua pelajaran tersebut lebih mudah diamati dan diukur perkembangannya.

Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam mengalami berbagai kendala dalam mencapai tujuannya. Salah satu bukti kegagalannya adalah ketidakmampuan pendidikan Agama Islam dalam menanamkan ajaran-ajaran agama kepada masyarakat untuk bisa dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Karena itu, dapat dengan mudah ditemukan penganut ajaran Islam yang justru melakukan tindakan teror, meski Agama Islam sangat mencintai perdamaian. Agama menghendaki keadilan sosial akan tetapi masyarakat enggan membayar zakat dan pajak, atau banyaknya kasus korupsi dan politik yang kotor di Indonesia

Adapun secara lebih detailnya pendidikan agama Islam saat ini harus menjawab bagaimana menjadikan pendidikan tersebut tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama, akan tetapi dapat mengarahkan peserta didik memiliki kualitas keberagamaan yang kuat sehingga pendidikan agama mampu membentuk sikap dan kepribadian masyarakat yang memiliki iman dan taqwa yang sesungguhnya, yang juga dipraktikkan dalam dunia realitas secara kontekstual. Sebagaimana pendapat Abdurrahman Wahid, untuk memperbaiki pendidikan Agama Islam, maka pendidikan Islam harus memperbaiki dirinya dalam dua hal, yaitu melakukan pembaharuan (*tajdid*) dan modernisasi (*hadasah*).

Menghadapi dunia yang semakin modern, pendidikan Islam harus mampu melakukan penyesuaian diri. Dua hal yang saling terkait dalam pendidikan Islam saat ini adalah pembaharuan (*tajdid*) dan modernisasi (*al-hadasah*). Dalam pembaharuan pendidikan Islam ajaran-ajaran formal harus lebih diutamakan, dan kaum muslim harus dididik dengan ajaran-ajaran agama mereka. Adapun yang diubah adalah cara-cara penyampaiannya sehingga ia akan mampu memahami dan mempertahankan kebenaran. Adapun modernisasi pendidikan Islam menuntut umat Islam untuk menjawab

tantangan modernisasi. Tantangan seperti pengentasan kemiskinan, lingkungan hidup dan kebangsaan.

C. Konsep Pemikiran Nasionalisme Gus Dur dalam Pendidikan Agama Islam

Pendidikan diakui sangat berperan dalam membentuk kepribadian masyarakat, tidak terkecuali pendidikan Agama Islam. Termasuk dalam membentuk jiwa-jiwa nasionalis pada pribadi muslim, pendidikan adalah kunci untuk mengatasi perpecahan bangsa dan membangun sumberdaya manusia, karena sikap mental yang dihasilkan oleh pendidikan mampu memberikan kemungkinan diketemukannya kesamaan dalam *frame of reference* dua orang dari dua daerah yang berbeda dalam memandang bangsanya.

Dalam hal ini Gus Dur memiliki enam prinsip dasar yang harus selalu dijadikan pijakan dalam pengembangan pendidikan Agama Islam. Enam hal tersebut adalah:

1. Lebih menekankan Islam universal.

Sesuatu yang menjadi garis besar dalam adalah harus adanya sebuah pandangan umum, bahwasanya Islam adalah agama yang menjunjung nilai-nilai kebenaran universal, sebagaimana agama-agama lain. Dengan begitu pendidikan diharapkan bisa menganut konsep ini, dengan memberi ruang penghargaan bagi agama lain. Universalisme Islam ini harus ditampakkan dalam berbagai bidang, yaitu dengan menampilkan kepedulian yang sangat besar kepada unsur-unsur utama dari kemanusiaan, seperti keselamatan fisik masyarakat di luar ketentuan hukum, keselamatan keyakinan agama, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta dan milik pribadi dan keselamatan hukum.

Pendidikan Agama Islam diharapkan mampu menyampaikan pesan-pesan universal Agama Islam tersebut kepada masyarakat. Dengan begitu masyarakat bisa saling menghargai satu sama lain, meski pada beberapa hal mereka memiliki perbedaan yang fundamental, seperti

perbedaan keyakinan. Secara materi pendidikan Islam harus mengajarkan teks-teks keagamaan secara komprehensif dengan mengedepankan nilai-nilai universal setiap agama, yaitu sebagai sebuah tatanan sosial yang menghendaki kedamaian di bumi. Dengan kata lain menjadi *abdullah* dan *khalifah* sekaligus. Hal itu sangat penting untuk memaknai teks-teks keagamaan secara kontekstual dan universal.

Salah satu pandangan yang juga perlu diikuti dalam hal ini adalah pendapat Gus Dur bahwa sudah tidak saatnya memperdebatkan perbedaan-perbedaan teologis yang ada, karena ini hanya akan menyedot energi umat pada suatu hal yang kontra produktif. Lebih baik memikirkan masalah bersama supaya masyarakat bisa semakin makmur dan kondisi bangsa tidak terpuruk lagi.

2. Berparadigma Islam substantif.

Diharapkan dengan pandangan ini akan mendidik masyarakat untuk lebih melihat kualitas keagamaan diri dibanding formalitas atau labelisasi belaka. Dalam kaitan ini yang terpenting adalah inti dari tujuan Islam tercapai meski menggunakan jalan yang dulunya tidak dikenal Islam.

Dalam dunia pendidikan, ajaran-ajaran agama untuk diajarkan secara lunak atau dengan menghormati pihak yang lain. Kalau memang ada istilah yang sudah dikenal atau mudah dipahami masyarakat tidak perlu diganti dengan menggunakan istilah Islam atau menyalinnya dengan Bahasa Arab. Tidak perlu membuat garis tegas untuk batasan yang islami dan bukan, jika memang memiliki inti yang sama. Apalagi bila pembatasan itu justru mengakibatkan masalah baru seperti perdebatan-perdebatan yang kontra produktif.

Internalisasi merupakan tahap selanjutnya setelah materi yang diajarkan tidak sekedar tekstualis. Pengajaran harus ditekankan pada ranah afektif dan psikomotorik. Dengan begitu, nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam mampu menjadi inspirator dan motivator dalam membangun masyarakat dan bangsa.

3. Islam sebagai komplementer dalam lingkup kebangsaan.

Agama Islam harus mampu memberi inspirasi dan motivasi bagi berjalannya pembangunan bangsa yang berideologi Pancasila, bukannya berperan sebagai ideologi tandingan yang bersifat disintegratif terhadap kehidupan bangsa secara keseluruhan. Sehingga pada akhirnya tujuan perjuangannya adalah memfungsikan Islam sebagai kekuatan integratif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat.

Sebagai alat sentral dalam penanaman nilai, pendidikan agama Islam harus memiliki kesadaran wawasan nasional atau nasionalisme. Setidaknya memiliki persamaan konsepsi bahwa Islam dan Bangsa Indonesia bisa saling menguatkan. Dengan berparadigma simbiotik maka keberlangsungan negara Indonesia bisa tetap dipertahankan sehingga energi pembangunan bisa lebih difokuskan untuk memberikan kesejahteraan dan kedamaian kepada masyarakat, bukan untuk menumpas gerakan separatis yang timbul.

Kesadaran ini diharapkan membuat pemikiran masyarakat lebih terbuka melihat konteks negaranya yang plural. Dalam hal ini, terlihat sangat tepat jika konsep yang dimiliki Syamsul Maarif mengenai pendidikan Islam multikultural diterapkan dalam pendidikan agama di Indonesia.

4. Pendidikan yang mencakup semua jenis.

Maksud dari semua jenis ini adalah pendidikan yang mencakup semua jenis yang ada, pendidikan formal seperti sekolah umum, pendidikan non formal seperti madrasah diniyah dan pondok pesantren serta pendidikan non formal seperti kelompok pengajian, tahlilan, atau forum-forum lain. Jika ingin membenahi pemahaman masyarakat, maka ketiga aspek ini harus mendapat perhatian yang sama. Disini yang paling berperan tentunya para guru dan pendakwah Agama Islam, untuk lebih bijak memandang dalam konteks agama dan kehidupan bangsa. Hal ini mengingat struktur masyarakat yang mayoritas belum terdidik dan masih terpusat pada figur yang ditokohkan.

Pembenahan harus dimulai dari pembenahan pola pikir masyarakat bawah, karena mereka merupakan aktor utama yang sangat menentukan. Peneliti melihat bahwa banyaknya kecaman dari masyarakat terhadap pemikiran Abdurrahma Wahid dikarenakan Gus Dur yang berjalan beberapa langkah lebih jauh meninggalkan pola pikir masyarakat. Ia belum mampu mentransformasikan gagasannya kepada masyarakat, sehingga apa yang ia cita-citakan tidak berjalan mulus. Padahal mengingat figur kyainya, ia bisa melakukan perubahan yang sangat besar.

5. Menggagas pribumisasi pendidikan Islam.

Abdurrahman Wahid memiliki konsep pribumisasi hukum Islam. Penulis kira tepat pula gagasan itu jika diterapkan dalam konsep pendidikan Islam. Menurut Abdurrahman Wahid konsep Pribumisasi Islam merupakan suatu pemahaman Islam yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama tanpa mengubah hukum itu sendiri.

Dengan begitu bisa diambil kesimpulan bahwa pribumisasi pendidikan Islam merupakan perumusan konsep pendidikan Islam dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal. Dengan begitu pendidikan Agama Islam mampu memasukkan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat dengan tetap menghargai nilai-nilai lokalitas yang lebih dulu ada.

6. Melakukan pembaharuan dan modernisasi.

Melakukan pembaharuan (*tajdid*) dalam penyampaian ajaran-ajaran formalnya dengan ajaran-ajaran Agama Islam. Adapun yang diubah adalah cara-cara penyampaiannya sehingga ia akan mampu memahami dan mempertahankan kebenaran. Batasan ini merupakan pengakuan Abdurrahman Wahid tentang pentingnya ajaran formal. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi harus lebih baik. Metode doktrinasi dan dogmatisasi yang membelenggu nalar pikir secepatnya ditanggalkan dan diganti dengan metode yang lebih kritis, dialogis, partisipatif dan aplikatif.

Adapun *Hadasah* atau modernisasi ini dimaksudkan supaya Agama Islam bisa lebih mendekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam modernisasi ini Agama Islam diharapkan mampu menjawab tuntutan zaman yang semakin maju. Umat Islam harus mampu menguasai Iptek, akan tetapi tidak menjadikannya bebas nilai.

Adapun yang diperlukan umat Islam dengan para pemikirnya adalah keberanian untuk menelaah kembali teks-teks ajaran Islam yang telah mapan sebelumnya dan mengukurnya kembali dengan Al Quran dan As Sunah. Tentusaja ini bukan masalah yang mudah. Soal pembaharuan pemikiran Islam ini secara konseptual sudah dinyatakan pula oleh Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa setiap seratus tahun akan terjadi pembaharuan dalam pemikiran Islam.

Akhir kata peneliti akan mengutip pendapat KH Abdurrahman Wahid bahwa Islam membedakan tindakan mengetahui (*to know*) dan kemampuan memahami (*to understand*) dan antara keduanya ini bisa saling tidak berhubungan⁶. Dengan mengetahui menjadikan seseorang pandai akan tetapi dengan memahami akan menimbulkan empati. Menggunakan empati merupakan salah satu syarat untuk menemukan akar permasalahan dan mencari solusi yang mampu menyelesaikan persoalan.

⁶ Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Bertutur*, (Jakarta: Harian Proaksi, 2005), hlm. 13.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai Pendidikan Agama Islam dan Penguatan Nasionalisme Bangsa Indonesia; Telaah atas Pemikiran KH Abdurrahman Wahid pada Buku *Islamku Islam Anda Islam Kita* dan *Islam Kosmopolitan* penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Gus Dur tentang nasionalisme Negara Indonesia adalah sebuah keharusan. Dalam artian umat Islam harus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan asas Pancasila. Karena pada dasarnya Islam tidak memiliki konsep mengenai bagaimana negara Islam diadakan. Menurut Islam tidak mengenal doktrin negara, akan tetapi sebagai agama, Islam merupakan landasan keimanan warga masyarakat dan menjadi unsur motivatif yang bisa memberikan warna spiritual kepada kegiatan masyarakat. Artinya, landasan pelaksanaan negara tidak boleh lepas dari spirit agama yang memberikan motivasi tersebut.

Selain itu, sebagai mayoritas kaum beragama, kaum muslimin di negeri ini sebaiknya melindungi agama lain itu. Hal ini yang justru menunjukkan kekuatan Islam yang sebenarnya. Ia sangat yakin Islam adalah agama besar yang tidak akan kehilangan kebesarannya karena menghargai yang lebih kecil, bahkan dengan melindungi yang lebih kecil itulah kebesaran agama Islam bisa ditunjukkan.

2. Ada beberapa konsep yang perlu dikembangkan dalam membangun relasi masyarakat di Indonesia. Salah satunya adalah mengenai berdasar empat landasan. Ukhuwah *diniyyah* (persaudaraan antar agama), *islamiyah* (persaudaraan sesama umat Islam), *ukhuwah wathoniyah* (persaudaraan sebangsa) dan *ukhuwah basyariah* (persaudaraan sesama manusia).

Dengan demikian umat Islam akan selalu menyokong tegaknya NKRI dan tidak perlu mendirikan negara Islam karena justru akan

menimbulkan konflik sehingga menghabiskan energi umat beragama untuk sesuatu yang kontra produktif. Hal ini tentu saja akan jauh dari misi agama Islam yaitu untuk menyelamatkan semua makhluk atau *rahmatan lil alamin*.

3. Pendidikan merupakan kunci pokok dalam pembentukan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia. Oleh karena itu diharapkan melalui pendidikan akan mampu melahirkan generasi yang memiliki kepribadian kuat dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Karena dengan begitu akan mampu menciptakan bangsa yang besar dan memiliki keadilan.

Pengembangan Pendidikan Agama Islam di sekolah, madrasah, pesantren atau masyarakat memiliki potensi untuk mewujudkan integrasi atau disintegrasi dan komunalisme. Keadaan ini sangat dipengaruhi oleh:

- a. Pandangan teologi agama dan doktrin ajarannya.
- b. Sikap dan perilaku pemeluknya dalam memahami dan menghayati agama tersebut.
- c. Lingkungan sosio-kultural yang mengelilinginya.
- d. Peranan dan pengaruh pemuka agama, termasuk guru agama, dalam mengarahkan pengikutnya. Ini karena ajaran-ajaran Islam masih berperan besar dalam menentukan nilai dan perilaku muslim.

Dengan begitu, sangat penting membangun pola pikir masyarakat melalui media pendidikan yang ada, baik pendidikan formal, non formal dan informal.

4. Gus Dur berharap pendidikan Islam secara umum akan mampu mendidik para muslim untuk lebih bersifat arif dan bijaksana menghadapi relita Indonesia yang plural ini. Ia mengajak umat Islam untuk lebih berfikir secara substantif dan sedikit meninggalkan formalitasnya. Dengan begitu ia berharap besar terhadap peran pendidikan Islam dalam mengajarkan Agama Islam lebih humanis dalam memandang komunitas atau agama lain.

Dalam menghadapi dunia yang semakin modern, pendidikan Islam dituntut untuk mampu menyesuaikan diri, dengan mengadakan tetap mengacu pada prinsip-prinsipnya, yaitu:

- a. Lebih menekankan Islam universal. Universalisme Islam ini harus ditampakkan dalam berbagai fikih, akidah dan akhlak. Pendidikan Agama Islam diharapkan mampu menyampaikan pesan-pesan universal Agama Islam tersebut kepada masyarakat.
- b. Berparadigma Islam substantif. Yaitu dengan mendidik masyarakat untuk lebih melihat kualitas keagamaan dibanding formalitas. Pengajaran harus ditekankan pada ranah afektif dan psikomotorik.
- c. Islam sebagai komplementer dalam lingkup kebangsaan. Agama Islam harus mampu memberi inspirasi dan motivasi bagi berjalannya pembangunan bangsa yang berideologi Pancasila, bukannya berperan sebagai ideologi tandingan yang bersifat disintegratif.
- d. Pendidikan yang mencakup semua jenis, baik pendidikan formal, non formal dan informal.
- e. Menggagas pribumisasi pendidikan Islam, yaitu: perumusan konsep pendidikan Islam dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal.
- f. Melakukan pembaharuan dan modernisasi pendidikan Islam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis sesuai kemampuan penulis, maka penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah

Sebagaimana telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya bahwa menurunnya nasionalisme ada banyak faktor. Diantaranya karena ideologi Pancasila belum mantap dan karena kondisi politik, ekonomi dan sosial yang tidak menentu. Maka saran penulis adalah menegakkan kembali ideologi dan identitas bangsa dengan membangun negara sesuai yang tertera dalam Pancasila. Adapun intinya adalah memberikan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun keadila ini akan tercapai jika rakyat dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dan mampu melakukan komunikasi efektif dengan rakyatnya melalui perangkat-perangkat yang ada. Adapun kedua hal ini bisa dicapai jika persatuan bangsa Indonesia ada, sedangkan persatuan akan terjalin jika adanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan bangsa Indonesia bisa berfikir adil dan beradab jika mereka memiliki keyakinan mengenai Tuhan yang maha esa.

2. Bagi pendidik dan pendakwah Agama Islam

Semua hal ini hanya bisa tercapai lewat pendidikan. Pendidikan yang tidak bertujuan membuat seseorang menjadi pintar saja atau sekarang menjadi kaya raya, tapi pendidikan seutuhnya yang mampu menjadi seorang manusia menjadi manusia seutuhnya, terbebaskan dari sifat-sifat hewani dalam dirinya.

Adapun yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut: a) Mengembangkan materi agama yang komprehensif sehingga materi ini dapat menampilkan wajah agama sebagai karunia bagi pemeluk agama tersebut maupun pemeluk agama lain (*rahmatan lil alamin*) di dalam semua bidang kehidupan. b) Mengembangkan metode pengajaran agama yang kritis, dialogis, dan aplikatif dengan tetap berpegang pada standar kaidah-kaidah agama. c) Menciptakan kehidupan keagamaan (intra dan antarumat beragama) yang interaktif, dialogis dan toleran sehingga menumbuhkan semangat kebersamaan dan kerjasama.

3. Bagi masyarakat

Indonesia yang plural adalah sebuah kenyataan sejarah yang sangat berharga sehingga harus dipertahankan. Lebih baik berpikir bagaimana membangun dan memakmurkan negara Indonesia yang telah ada supaya kita bisa bangga hidup di negara yang indah ini, daripada memikirkan untuk meruntuhkan bangunan yang ada dan menggantinya dengan yang baru yang justru dinilai akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar. Lebih baik memanfaatkan semua potensi bangsa untuk sesuatu yang produktif sebagai bantuk kecintaan dan jihad kita. Jihad berarti

mengerahkan kemampuan diri sendiri dengan sungguh-sungguh, semisal dalam membangun kesejahteraan umat manusia, menegakkan disiplin sosial, membangun negara yang demokratis. Nilai-nilai seperti halnya keadilan, demokrasi penghormatan terhadap pluralisme juga merupakan bagian dari jihad. Jihad tidak sebatas untuk kepentingan umat Islam akan tetapi untuk umat manusia secara keseluruhan.

C. Penutup

Dengan rasa syukur ke hadirat Allah Swt. akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, namun kekurangan dan kesalahan tetaplah menjadi suatu keniscayaan atas diri manusia. Untuk itu, kritik dan saran senantiasa penulis harapkan demi perbaikan makalah ini dan perluasan pengetahuan keilmuan bagi kita semua.

Bagi penulis skripsi ini setidaknya menjadi kado kecil untuk memperingati 100 tahun kebangkitan nasional Republik Indonesia. Akhirnya, hanya pada Allah yang menjadi tumpuan untuk memohon pertolongan, semoga memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Semoga ini menjadi bagian dari setetes pengetahuan yang Allah berikan pada umat manusia dari selaksa samudera ilmunya. Amiin.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.
- Al Abrosyi, Muhammad Athiyah, *Education in Islamiyyah*, The Suprema Council for Islamic Affairs, t.t.
- Anderson, Benedict, *Imagined Communities Komunitas-Komunitas Terbayang*, Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar, 2001, cet. ke-2.
- Anwar, Fuad, *Melawan Gus Dur*, Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2004.
- Azizy, Qodri, *Membangun Integritas Bangsa*, Jakarta: Renaisan, 2004.
- _____, *Pendidikan Agama Untuk Membangun Etika Sosial*, Semarang: Aneka Ilmu, 2002.
- Azra, Azyumardi, *Islam Substantif*, Jakarta: Mizan, 2000.
- Bakri, Syamsul dan Mudhofir, *Jombang Kairo Jombang Chicago Sintesa Pemikiran Gus Dur dan Cak Nur dalam Pembaruan Islam di Indonesia*, Solo: Tiga Serangkai, 2004.
- Bukhori, Imam, *Matan Masykul al Bukhori*, (Kairo: Darulfikr, tt).
- _____, *Terjemah Hadits Shahih Bukhori*, Jakarta: PT Bumi Restu, 1992.
- Chamim, Asykuri Ibn et.al, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2003.
- Dagun, Save M., *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1997.
- Departemen Agama, *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Penilaian Berbasis kelas (Al-Qur'an Hadits)*, Jakarta: Depag, t.th.

Gulo, W, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2004, cet. ke-4.

Hadi, Abdul WM, "Pancasila, Nasionalisme, Islam, dan Kolonialisme",
<http://ahmadsamantho.wordpress.com/2007/11/12/195/>.

Hall, John A. (ed.), *The State of The Nation*, New York: Cambridge University, 1998.

Hefner, Robert W., *Civil Islam*, USA: Princeton University, 2000.

Ikhsan, Fuad, *Dasar-dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, cet. Ke-1.

Isre, Moh Sholeh (ed), *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, Jakarta: depag RI.

Madjid, Nurcholis, "Madrasah yang Terus Tersendat", *Kompas*, Jakarta, 10 Oktober 2001.

_____, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1993.

_____, *Islam Universal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.

Majid, Abdul dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Maliki, Zainuddin, *Agama Rakyat Agama Penguasa*, Yogyakarta: Galang Press, 2000.

Mihardjo, Imam Kuseno, "Bingkai Teologis Kerukunan Umat beragama, dalam *Agama-Hak Azasi Manusia dan Keutuhan Bangsa*, Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000.

Moesa, Ali Maschan, *Nasionalisme Kyai*, Yogyakarta: Lkis, 2007.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2002, cet. ke-17.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, cet. ke-3.

Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2003.

Muntholi'ah, *Konsep Diri Positif Penunjang Prestasi PAI*, Semarang: Gunungjati dan Yayasan Al Qalam, 2002.

Mursyi, Muhammad Munir, *At-Tarbiyah al-Islamiah*, Kairo: Darul Kutub, 1977.

Muttaqin, Tatang dan Aris Subiyono, "Studi Pengembangan dan Pemantapan Wujud Ikatan Kebangsaan", http://www.budpar.go.id/filedata/1004_168-Kajian20041.pdf.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007.

Poespowardojo, Soerjanto (ed), *Pendidikan Wawasan kebangsaan*, Grasindo: Jakarta, 1994.

Santoso, Listiyono, *Teologi Politik Gus Dur*, Yogyakarta: Ar Ruzz, 2004.

Setiawan, Zudi, *Nasionalisme NU*, Semarang: Aneka Ilmu, 2007.

Shihab, Quraish, *Membumikan Al qur'an*, Bandung: Mizan, 2003, cet ke-17.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.

- Sumardjan, Selo (*ed*) *Menuju Tata Indonesia Baru*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Supriadi, Dedi, *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Tilaar, H.A.R, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*, Magelang: Tera Indonesia, 1999.
- Toha, Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bandung: Citra Umbara, 2003.
- Wahid, Abdurrahman, “Gus Dur Ketemu Huntington”, <http://islamlib.com/id/index.php?id=465&page=article>.
- _____, “Lain Jaman, Lain Pendekatan”, gusdur.net.
- _____, *Gus Dur Bertutur*, Jakarta: Harian Proaksi, 2005.
- _____, *Gus Dur Menjawab Kekelisahan Rakyat*, Jakarta: Kompas, 2007.
- _____, *Islam Kosmopolitan*, Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- _____, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006, cet ke-2.
- Yatim, Badri, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, Jakarta: Logos, 1999.
- Zuhairini, et. al, *Metode Khusus Pendidikan Agama*, Surabaya: Biro Ilmiah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang, 1981.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITIAN

Nama : Mansata Indah Maratona
NIM : 3103081
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 31 Maret 1985
Alamat Asal : RT 05/VII Dsn Grompol Ds. Kradenan Kec.
Kradenan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah
Telepon : 024 70 528 521 / 085 640 309 943
Email : tata_maratona@yahoo.co.id
Website :tatayu.wordpress.com

Jenjang Pendidikan Formal

1. SDN IV Kradenan Lulus Tahun 1997
2. MTs Al Hidayah Kradenan Lulus Tahun 2000
3. MAN Purwodadi Lulus Tahun 2003
4. IAIN Walisongo Semarang Angkatan 2003

Jenjang Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah al Fiqhiyah Wates Kradenan
2. Madrasah Diniyah Assalam Grompol Kradenan
3. Pesantren Assalam Kradenan
4. Ponpes Manbaul A'la Purwodadi

Pengalaman Organisasi:

1. Intra Kampus:
 - a. Pemimpin Redaksi Buletin Quantum tahun 2004-2005
 - b. Redaktur Majalah periode 2005-2007
 - c. Pemimpin Redaksi Jurnal EDUKASI pada tahun 2006-2007
 - d. Redaktur Jurnal pada tahun 2006 – 2008

2. Ekstra Kampus:

- a. Pengurus Cabang Ikatan Pemuda Pemudi Nahdlatul Ulama Grobogan
- b. Pengurus Panti Asuhan Yayasan Assalam Grobogan
- c. Redaktur Buletin Serambi Masjid Agung Jawa Tengah
- d. Redaktur Tabloid Wood Biz Indonesia

Semarang, 30 Juni 2008

Peneliti

Mansata Indah Maratona
NIM. 3103081